KEDIRI BERBUDAYA

Mas Bup

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025



Disusun sesuai dengan
Peratuaran Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah4

Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Kediri
Tahun 2026

Daftar Isi

Pengantar Bupati Kediri I-3

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

A. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 17

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 25

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 30

D. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 34

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 38

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 75

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 78

BAB IV PENUTUP 103

LAMPIRAN 104

Daftar Gambar

1. Gambar 1 1
2. Gambar 2 3
3. Gambar 3 3
4. Gambar 4 4
5. Gambar 5 11
6. Gambar 6 15
7. Gambar 7 110

Daftar Tabel

1. Tabel 1 12
2. Tabel 2 17
3. Tabel 3 25
4. Tabel 4 31
5. Tabel 5 37
6. Tabel 6 42
7. Tabel 7 81
8. Tabel 8 96
9. Tabel 9 100
10. Tabel 10 103

Kata Pengantar Bupati Kediri



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Masyarakat Kabupaten Kediri dan Para Pemangku Kepentingan yang saya hormati,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, kekuatan, dan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua. Berkat perlindungan-Nya, kita dapat menuntaskan amanah pembangunan di Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2025 dengan semangat pengabdian yang tulus.

Tahun 2025 merupakan momentum krusial bagi kita untuk bangkit. Di tengah dinamika perekonomian global, saya menyaksikan sendiri bagaimana kesungguhan dan semangat pantang menyerah masyarakat Kabupaten Kediri untuk terus berkembang. Semangat kolektif inilah yang menjadi cambuk dan pelecut bagi kami di pemerintahan untuk memastikan setiap program yang direncanakan berjalan tepat sasaran.

Melalui visi, 9 misi, 11 tujuan, dan 20 sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen pada pembangunan yang inklusif. Setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kami kelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*). Kami berupaya keras untuk tidak gegabah, memastikan setiap *output* dan *outcome* yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Menyongsong tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan adalah kunci utama.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri atas dedikasi dan kontribusinya. Mari kita perkuat sinergi untuk mewujudkan Kabupaten Kediri yang Raharja, Mukti, dan Berbudaya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya bagi kita semua dalam membangun Kediri tercinta.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
Bupati Kediri



Hanindhito Himawan Pramana

Tindaklanjut atas Rekomendasi LHE Reviu Tahun sebelumnya

Berdasarkan surat Inspektur tanggal 18 Maret 2025 nomor 700.1.2.1_047/418.11/2025 perihal Laporan Reviu LKjIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Menyesuaikan Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja yang diinput di dalam dokumen LKjIP Pemerintah Kabupaten Kediri 2024 dengan dokumen perencanaan kinerja lain yang telah disusun;	Data telah disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025;
2	Melakukan pengesahan atas *draft* SOP/Mekanisme Penyampaian Data dan Informasi dari Unit Kerja ke Unit Penyusun LKjIP	SOP Penyampaian Data dari Unit Kerja ke Unit Penyusun LKjIP telah disusun.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 September 2024 nomor B/284/AA.05/2024 perihal Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024:

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Melakukan penyebarluasan terkait capaian kinerja tahun 2023 baik pada level Kabupaten maupun Perangkat Daerah melalui LPPD/Laporan Kinerja yang di *upload* pada website resmi yang dikelola Kabupaten Kediri maupun Perangkat Daerah;	Mendorong OPD dan Melakukan Rekapitulasi atas Penyebarluasan Informasi LKjIP oleh Perangkat Daerah;
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh Perangkat Daerah dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta merencanakan strategi/upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja organisasi;	Telah disusun draft LKjIP sesuai PermenPANRB 53 Tahun 2014 sebagai acuan OPD dalam menyusun LKjIP Telah dilaksanakan pendampingan dan desk penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya menyusun laporan kinerja sesuai dengan ketentuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun menggunakan prinsip penyampaian data secara objektif dan berorientasi perbaikan kedepan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menetapkan informasi-informasi tersebut secara akurat. Dalam pelaporan ini, dilaporkan hasil kinerja dalam rentang waktu 1 tahun yakni mulai 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri sebagaimana termuat dalam RKPD dan P-RKPD Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025.

1.2 Profil dan Karakteristik Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri adalah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yang membentang antara 1110 47’ 05” s/d 1120 18’ 20” Bujur Timur dan 70 36’ 12” s/d 80 0’ 32” Lintang Selatan. Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.563,42 Km2 atau 153.642 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, dengan 344 kelurahan/desa. Topografi wilayah yang cukup beragam dengan rata-rata ketinggian tanah di antara 0 – 500 meter dari permukaan laut (dpl). Wilayah bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 200 meter dpl, sementara pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang.

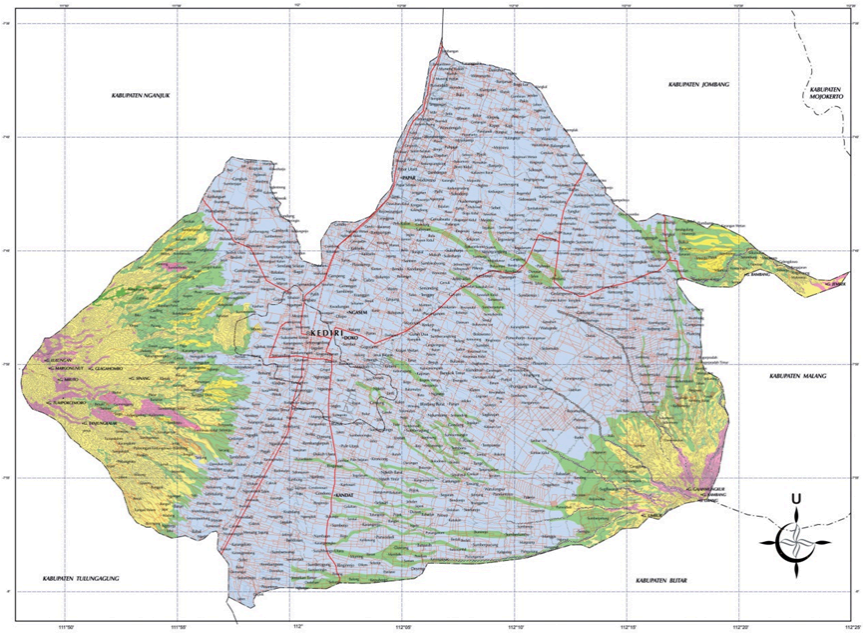
Kabupaten Kediri memiliki Sungai Brantas yang membelah wilayahnya dan bahkan menjadi faktor klasifikasi karakteristik geologis wilayahnya. Menurut ini karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
- Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;
- Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Wilayah tersebut berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang serta sebelah barat adalah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

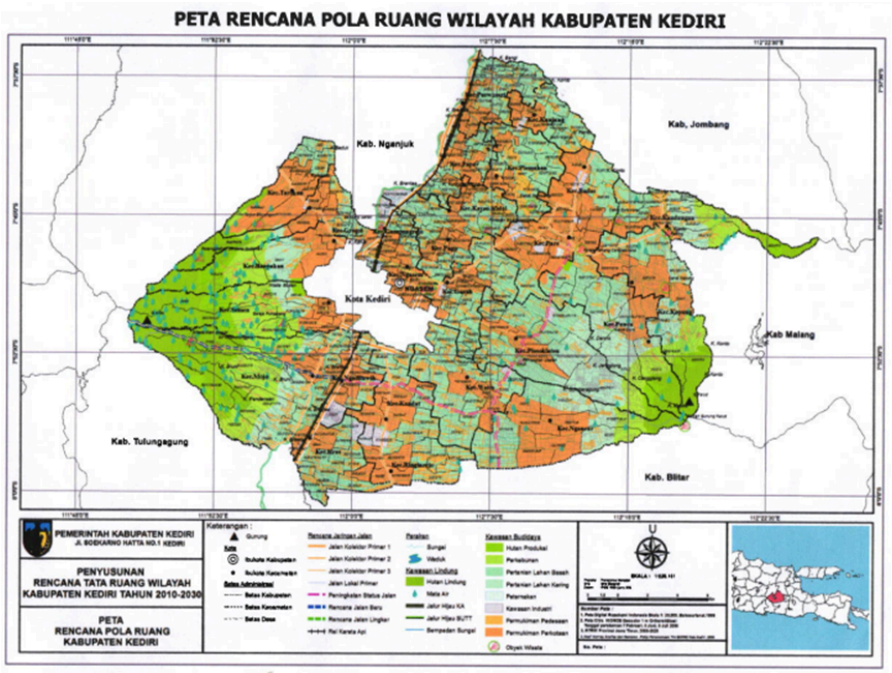
Wilayah Kabupaten Kediri yang berdekatan dengan kawasan gunung berapi dan pegunungan lain, memiliki potensi bencana cukup tinggi. Di Kabupaten Kediri, sedikitnya terdapat empat kecamatan dari 26 yang masuk kawasan bahaya gunung berapi. Keempat kecamatan itu yakni, Kecamatan Ngancar, Puncu, Kepung dan Kecamatan Wates. Di wilayah barat sungai Brantas yang merupakan wilayah pegunungan, memiliki potensi bencana longsor. Untuk Gunung Kelud sebagai gunung berapi aktif, berpotensi untuk terjadi erupsi kembali. Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah dengan menyusun dokumen perencanaan strategis mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap tanggap bencana, dan ini sosialisasi dan internalisasi rencana pengetahuan tanggap bencana bagi siswa-siswa sekolah menjadi salah satu materi bahan muatan lokal kurikulum pendidikan

Gambar 2 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Kediri



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Gambar 3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri 2010-2030



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri



Gambar 4 Lambang Pemerintah Kabupaten Kediri

A. Kedudukan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 BAB VI Pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang diatur secara adil dan selaras.

B. Wewenang

Sebagaimana tertuang dalam Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi di daerah yang bersangkutan.

C. Tugas Pokok

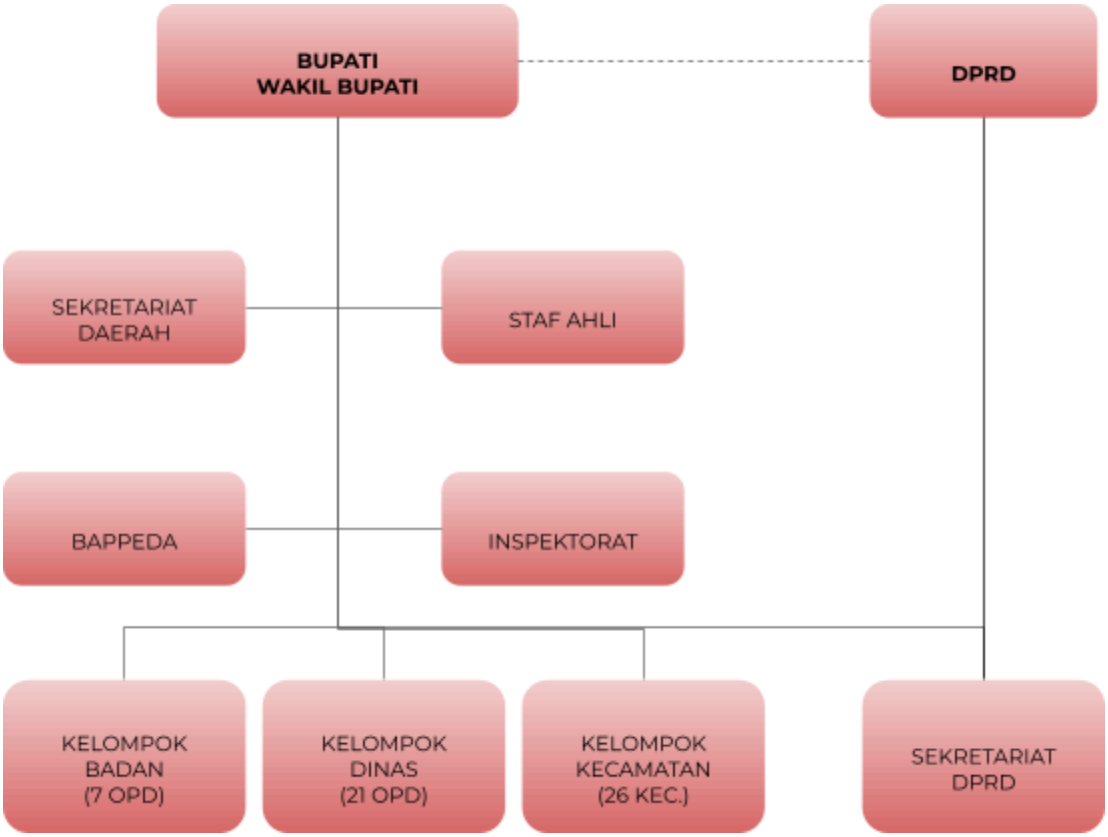
Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
b. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Tata Ruang;
c. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;
e. Penanganan Bidang Kesehatan;
f. Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Penanggulangan Masalah Sosial;
h. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
i. Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
j. Pengendalian Lingkungan Hidup;
k. Pelayanan Pertanahan;
l. Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
n. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
o. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar lainnya Urusan Wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-undangan;

A. Struktur Organisasi

Pada bagian ini dijelaskan tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

Peraga 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri



Sumber: (diolah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)

Daftar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Sosial
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
20. Dinas Tenaga Kerja
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
27. Dinas Pertanian dan Perkebunan
28. Dinas Perikanan
29. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30. Sekretariat DPRD
31. Satuan Polisi Pamong Praja
32. Kecamatan Semen
33. Kecamatan Mojo
34. Kecamatan Kras
35. Kecamatan Ngadiluwih
36. Kecamatan Kandat
37. Kecamatan Wates
38. Kecamatan Ngancar
39. Kecamatan Puncu
40. Kecamatan Plosoklaten
41. Kecamatan Gurah
42. Kecamatan Pagu
43. Kecamatan Gampengrejo
44. Kecamatan Grogol
45. Kecamatan Papar
46. Kecamatan Purwoasri
47. Kecamatan Plemahan
48. Kecamatan Pare
49. Kecamatan Kepung
50. Kecamatan Kandangan
51. Kecamatan Tarokan
52. Kecamatan Kunjang
53. Kecamatan Banyakan
54. Kecamatan Ringinrejo
55. Kecamatan Kayen kidul

56. Kecamatan Ngasem
57. Kecamatan Badas

1.4 Permasalahan Strategis

Merujuk pada BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri tahun 2021-2026, permasalahan-permasalahan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

1. Pentingnya akses dan daya dukung sistem pendidikan sebagai upaya menjamin hak dasar masyarakat Kabupaten Kediri dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang inklusif.
2. Pentingnya integrasi kebutuhan sektor tenaga kerja terhadap kualitas pendidikan sebagai upaya menciptakan SDM masyarakat Kabupaten Kediri yang berdaya saing
3. Peningkatan kualitas pendampingan ibu hamil, menyusui dan balita.
4. Perlunya meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan penanggungan premi pada masyarakat miskin oleh pemerintah daerah.
5. Kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif ancaman penyebaran penyakit menular
6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tanggap bencana berbasis kearifan lokal dalam kemajemukan kultur budaya masyarakat. Kearifan lokal terkait dengan kondisi lingkungan sekitar dan mengembangkan adaptasinya.
7. Pentingnya meningkatkan cakupan penerima jaminan sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan PMKS.
8. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
9. Pentingnya kepatuhan terhadap penegakan regulasi penggunaan lahan dalam menciptakan tatanan ruang publik yang berkelanjutan yang mendukung kualitas lingkungan hidup.
10. Kebutuhan terhadap pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah sebagai upaya mereduksi pencemaran dan memberikan alternatif penghidupan masyarakat sehingga menciptakan masyarakat peduli lingkungan
11. Meningkatkan jumlah rumah layak huni masyarakat dan kesadaran untuk hidup bersih
12. Tuntutan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan pusat perekonomian baru dalam menangkap peluang dibukanya bandara internasional Kabupaten Kedir
13. Penguatan PDRB sektor perdagangan melalui optimalisasi ekspor daerah khususnya pada sektor industri kertas.
14. Kinerja tim pengendali inflasi masih perlu ditingkatkan khususnya pada upaya preventif
15. Perlunya peningkatan kondusivitas iklim investasi.
16. Perlunya penertiban terhadap perusahaan yang belum memfasilitasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada karyawannya.
17. Perlunya peningkatan kinerja koperasi
18. Pusat pertumbuhan (Contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan event/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim
19. Perlunya pemutakhiran data perindustrian untuk mengawal pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri.

20. Perlunya peningkatan produksi, produktivitas serta integrasi produk hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan sektor industri pengolahan dan jasa.
21. Perlunya integrasi produk hasil pertanian dengan sektor industri pengolahan
22. Perlunya peningkatan produktivitas perikanan khususnya budidaya baik ikan konsumsi maupun ikan hias, yang melayani pasar domestik maupun ekspor.
23. Pengembangan sistem pertanian terpadu sehingga petani menghasilkan *multi revenue* seperti melalui minapadi
24. Meningkatkan efisiensi distribusi air pada sistem irigasi dan reservoir/waduk-waduk penampungan air untuk pertanian.
25. Kemudahan akses dan bantuan modal pelaku usaha perikanan dan meningkatkan kualitas produksi perikanan
26. Perlunya pembuatan peta pengembangan SDM yang mengakomodir tantangan pembangunan 20 tahun ke depan.
27. Perlunya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
28. Perlunya pemutakhiran infrastruktur IT;
29. Pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pada setiap desa.
30. Penataan alokasi anggaran yang lebih memperhatikan belanja yang berpengaruh pada kinerja program.;
31. Optimalisasi pendanaan dari sumber keuangan baik dari daerah maupun provinsi/pusat.

1.5 Dasar Hukum dan Panduan Penyusunan Laporan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri didasari atas dasar hukum sebagai berikut:

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
16. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, pedoman yang digunakan adalah pedoman Sistematika penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 dan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kedua peraturan tersebut digunakan sebagai *guidance* (penuntun) dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan satu rangkaian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menuju penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan

Penyusunan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah kesimpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Bab II
Perencanaan Kinerja

2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut;

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Misi

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2025 yang merujuk pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	75,69
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,8
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	85,99
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80
			I K M	88,74
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	4,65 – 5,35
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	3,03

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/kapita/tahun
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,69
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37
			Indeks Kualitas Udara	79,65
			Indeks Kualitas Lahan	39,34
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan :** **Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0,78
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri selama tahun 2025. Hasil kinerja ini akan diperbandingkan, dianalisa, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah disusun dan dilampirkan dalam bab sebelumnya. Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. **Persentase capaian meningkat (positif)**
   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \; x \; 100$$

2. **Persentase capaian menurun (negatif)**
   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x \; 100$$

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;

Tabel 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,69**	**76,09**	**100,53%**	**Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,77	100,88%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3	8,38	100,96%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07	75,41	100,45%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/1913/418.25/2026
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5,0**	**4,71**	**105,80%**	**Berita Resmi Statistik No. 14/12/3506/Th. XXIX, 24 Desember 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.30/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31	69,65	97,67%	Berita Resmi Statistik No. 14/12/3506/Th. XXIX, 24 Desember 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja tanggal 30 Januari 2026 nomor

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
							000.8.6.3/8/418.30/2026
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	**9,8**	**9,81**	**99,90%**	**Berita Resmi Statistik No. 09/09/3506/Th. XXIX, 25 September 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Sosial tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.26/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05	89,63	99,04	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi Inkelud sebagaimana termuat dalam Surat Kepala DP2KBP3A tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.2/16/418.22/2026
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**79**	**79**	**100,00%**	**Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026**
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,99**	**83,16***	**96,71%**	**Diambil per tanggal 12 Februari 2025 dari Menu Evaluasi pada portalrb.id sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026**
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80	66,52	83,15%	Surat Menteri PANRB tanggal 30 Desember 2025 nomor B/513/AA.05/2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
			I K M	88,74	88,01	99,17 %	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 67.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 Tanggal 23 Mei Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala BKAD tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/0578/418.51/2026
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	3,85	100,00%	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik sebagaimana termuat dalam Surat Inspektur tanggal 20 Januari 2026 nomor 600.4.23.1/29/418.11/2026
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	83,67	102,51	Data IP ASN per 5 Januari 2026 Sumber : https://asndigital.bkn.go.id sebagaimana termuat dalam Surat Kepala BKPSDM tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/3/418.50/2026
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	4,62	100,00%	Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/67/418.31/2026
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,65 – 5,35**	**5,03**	**108,17%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	-63,58%	-212,00%	Laporan Realisasi Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 30 Januari

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
							2026 nomor 000.8.6.3/17/418.27/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267	1.080.667	77,56%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.XXIX, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 21 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/28/418.28/2026 dan Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.7.2.6/25/418.29/2026
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**3,03**	**5,96**	**196,70%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita/ tahun	101,67%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tanggal 28 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.36/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,69	113,73	108,68%	Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/91/418.37/2026
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**	**81,19**	**115,98%**	**Laporan Akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri 2025 Hal. 122 Kategori Kepuasan sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 2 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.54/2026**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%	89,37%	102,70%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%	88,26%	109,25%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	100%	100%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%	86,10%	100,01 %	Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 2 Februari 2026 000.8.6.3/27/418.32/2026
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%	54,15 %	101,12 %	Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 2 Februari 2026 000.8.6.3/27/418.32/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	81,47	93,17%	Surat Kepala Dinas Perhubungan tanggal 23 Januari 2025 nomor 000.8.6.3/97/418.34/2026
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**	**8,85**	**90,40%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	0,33%	3,01%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**	**69,64**	**98,78%**	**Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37	74,21	102,54%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
			Indeks Kualitas Udara	79,65	71,66	89,97%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	58,05	147,56%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35	103,85	88,75%	Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 30 Januari 2026 nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Pelaksana BPBD tanggal 10 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/12/418.74/2026
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**	**90,90%**	**92,55%**	**Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%	58,30%	102,91%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**	**73,00**	**82,02%**	**Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	76,97%	117,91	Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,78**	**0,78**	**100,00%**	**Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.24/2026**
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	97,38%	103,09%	Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.24/2026

*) Angka Sementara

Keterangan:

Rentang Capaian	Jumlah Data	Persentase dari Total
> 100%	20	46,51%
80% > x >100%	20	46,51%
60% > x > 80%	1	2,33%
< 60%	2	4,65%
Total	**43**	**100%**

Catatan:

1. Pertumbuhan investasi daerah selama tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2022 capaian pertumbuhan sebesar 35,07%, diikuti tahun 2023 sebesar 26,16% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 29,99%, yang mencerminkan kondisi investasi daerah masih tumbuh positif dan relatif stabil. Namun pada tahun 2025 pertumbuhan investasi tercatat -63,58%, yang disebabkan oleh selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama realisasi investasi daerah. Namun, apabila dilakukan perbandingan data dengan membandingkan Investasi Non-Bandara, maka terdapat pertumbuhan sebesar 16,1% (dari Rp1,45 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,69 Triliun di tahun 2025);

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terkahir

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,2**	**74,68**	**75,18**	**76,09**	**Meningkat (74,2 ke 76,09)**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,62	13,63	13,77	Meningkat (13,61 ke 13,77)
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,26	8,38	Meningkat (8,23 ke 8,38)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,58	74,85	75,07	75,41	Meningkat (74,58 ke 75,41)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**6,83**	**5,79**	**5,10**	**4,71**	**Menurun (Positif/Lebih Baik) (6,83% ke 4,71%)**
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,73	68,74	71,31	69,65	Meningkat (68,73% - 69,65%)
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	**10,65%**	**10,72%**	**9,95%**	**9,81%**	**Menurun (Positif/Lebih Baik) (10,65% ke 9,81%)**
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	71,12%	84,78%	90,05%	89,63%	Meningkat (71,12% ke 89,63%)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**-**	**77,86**	**79**	**79**	**Meningkat (77,86 ke 79)**
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	100%	Stabil (Konsisten 100%)
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**65,66**	**77,00**	**87,09**	**83,16**	**Meningkat (65,66 ke 83,16)**
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	68,33	68,21	67,16	66,52	Menurun (68,33 ke 65,52)
			I K M	85,77	86,40	88,74	88,01	Meningkat (85,77 ke 88,01)
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	Stabil (Konsisten WTP)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93	3,92	3,85	3,85*	Menurun (3,93 ke 3,85)
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82,23	81,62	83,67	83,67	Meningkat (82,23 ke 83,67)
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	2,61	4,27	4,62	4,62	Meningkat (2,61 ke 4,62)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,9**	**4,53**	**4,95**	**5,03**	**Meningkat (4,9 ke 5,03)**
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	35,07 %	26,16 %	29,99%	-63,58%	Menurun (35,07 % ke -63,58%)
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Rp963.750	Rp996.000	Rp1.032.333	Rp1.080.667	Meningkat (Rp963.750 ke Rp1.080.667)
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**0,02**	**3,03**	**-1,73**	**5,96**	**Meningkat (0,02 ke 5,96)**
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	117,48 kg/kapita/ tahun	128,08 kg/kapita / tahun	146,44 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita / tahun	Meningkat (117,48 ke 148,88 kg/kapita)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103,54	104,44	104,65	113,73	Meningkat (103,54 ke 113,73)
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**66,82**	**-**	**69,84**	**81,19**	**Meningkat (66,82 ke 81,19)**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87,99%	79,08%	86,99%	89,37%	Meningkat (87,99% ke 89,37%)
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	74,68%	69,17%	80,79%	88,26%	Meningkat (74,68% ke 88,26%)
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	31,25%	62,5	100%	100%	Meningkat (31,25% ke 100%)
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	85,23%	86%	86,08%	86,10%	Meningkat (85,23% ke 86,10%)
			Persentase Rumah Layak Huni	29,95%	41,14%	53,55%	54,15%	Meningkat (29,95% ke 54,15%)
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,48	86,59	87,44	81,47	Menurun (86,48 ke 81,47)
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	12,40	9,79	9,70	8,85	Menurun (12,40 ke 8,85)
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	95,58%	18,31%	10,95%	0,33%	Menurun (95,58% ke 0,33%)
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**64,79**	**67,42**	**70,49**	**69,64**	Meningkat (64,79 ke 69,64)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,22	62,97	62,97	74,21	Meningkat (62,22 ke 74,21)
			Indeks Kualitas Udara	80,94	86,12	94,31	71,66	Menurun (80,94 ke 71,66)
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	40,49	39,34	58,05	Meningkat (39,34 ke 58,05)
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	112,47	104,53	97,89	103,85	Menurun (Positif/Lebih Baik) (112,47 ke 103,85) : Sesuai Surat BNPB nomor B-4/BNPB/D-I/ISS.01.03/1/2026 dalam point 5. bahwa Nilai IRB Tahun 2025 dihitung menggunakan komponen baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024.
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**80,77%**	**98,11%**	**98,21%**	**90,90%**	**Meningkat (80,77% ke 90,90%)**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	22,99%	35,86%	56,65%	58,30%	Meningkat (22,99% ke 58,30%)
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**73,96**	**57,30**	**60,00**	**73,00**	**Menurun (73,96 ke 73,00)**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	58,26	59,50	65,28	76,97	Meningkat (58,26 ke 76,97)
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0,73	0,75	0,78	0,78	Meningkat (0,73 ke 0,78)
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	63,56%	84,55%	94,46%	97,38%	Meningkat (63,56% ke 97,38%)

Keterangan:

Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Meningkat	30	69,77%
Menurun (Positif/Lebih Baik)	3	6,98%
Stabil/Konsisten	2	4,65%
Menurun	8	18,60%
TOTAL	**43**	**100%**

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD;

Tabel 4 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	7
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,65**	**76,09**	**100,58%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,77	100,88%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,30	8,38	100,96%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72,87	75,41	100,45%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,6	4,71	97,61%	Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,50	69,65	97,41%	Mendekati Target Jangka Menengah
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	8,04	9,81	77,99%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	7
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	73,11	89,63	122,59%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**79**	**79**	**100,00%**	Mencapai Target Jangka Menengah
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100,00%	Mencapai Target Jangka Menengah
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**80**	**83,16**	**103,95%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	82	66,52	81,12%	Mendekati Target Jangka Menengah
			I K M	86	88,01	102,30%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Mencapai Target Jangka Menengah
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,76	3,85*	102,39%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71,00	83,67	117,85%	Melampaui Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,76	4,62	97,06	Mendekati Target Jangka Menengah
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	6,22	5,03	80,87%	Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	-63,58%	-212,00%	Kurang Mencapai Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.310.563	1.080.667	82.46%	Mendekati Target Jangka Menengah
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	0,44	5,96	1354,55%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	147,56 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita/ tahun	100,90%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	113,73	108,31 %	Melampaui Target Jangka Menengah
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	69,30	81,19	117,15%	Melampaui Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89,69%	89,37%	99,64%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	92,20%	88,26%	95,70%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	100%	100%	Mencapai Target Jangka Menengah
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	93,15%	86,10%	92,43%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Persentase Rumah Layak Huni	82,51%	54,15%	65,63%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,25	81,47	94,46%	Mendekati Target Jangka Menengah
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**5,04**	**8,85**	**175,60%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9%	0,33%	3,67%	Kurang Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	7
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**65**	**69,64**	**107,14%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,97	74,21	117,85%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Indeks Kualitas Udara	77,68	71,66	92,25%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Indeks Kualitas Lahan	37,42	58,05	115,13%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	116,32	103,85	110,72%	Melampaui Target Jangka Menengah
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**90%**	**90,90%**	**101%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	10%	58,30%	583%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	99,00	73,00	73,73%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	100,00%	76,97%	76,97%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0,75	0,78	104,00%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	68,80%	97,38%	141,54%	Melampaui Target Jangka Menengah

Keterangan

Kategori Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
Melampaui Target (>100%)	22	51,2%
Mencapai Target (100%)	4	9,3%
Mendekati Target (80% >x> 100%)	11	25,6%
Cukup Mendekati (60% >x> 80%)	4	9,3%
Kurang/Jauh dari Target (< 60%)	2	4,6%
Total	**43**	**100%**

D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional dan provinsi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	76,09	76,13	75,9	Lebih rendah dari Provinsi (76,13), namun lebih tinggi dari Nasional (75,9)
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,77	13,44	13,30	Lebih tinggi dari Provinsi (13,44) dan Nasional (13,30).
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,38	8,81	9,07	Lebih rendah dari Provinsi (8,81) dan Nasional (9,07).
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,41	75,36	74,47	Lebih tinggi dari Provinsi (75,36) dan Nasional (74,47).
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,71	3,88	4,85	Lebih tinggi dari Provinsi (3,88%), namun lebih rendah (lebih baik) dari Nasional (4,85%).
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,65	73,98	70,59	Lebih rendah dari Provinsi (73,98%) dan Nasional (70,59%).
Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,81%	9,50%	8,47%	Lebih tinggi dari Provinsi (9,50%) dan Nasional (8,47%).
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	89,63	90,50	91,53	Lebih rendah dari Provinsi (90,50%) dan Nasional (91,53%).
Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79	84,17	79,81	Lebih rendah dari Provinsi (84,17) dan Nasional (79,81).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Sama dengan Provinsi dan Nasional
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	83,16	-	71,83 (Rata-rata Nasional)	Lebih dari tinggi rata-rata Nasional (71,83). Tidak ada pembanding Provinsi.
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	66,52	-	64,89 (Rata-rata Nasional)	Lebih tinggi rata-rata Nasional (64,89). Tidak ada pembanding Provinsi.
	I K M	88,01	89,71	-	Lebih rendah dari Provinsi (89,71). Tidak ada pembanding Nasional.
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	-	Sama dengan Provinsi
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	83,67	IP PNS : 83,15 IP PPPK : 70,37	-	Lebih tinggi dari Provinsi (83,15 dan 70,37), Tidak ada Pembanding Data Nasional
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	4,04	3,80	Lebih Tinggi dari Provinsi (4,04) dan Nasional (3,80).
Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	5,03	5,85	5,11	Lebih Rendah dari Provinsi (5,85%) dan Nasional (5,11%).
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	1,69 Triliun Rupiah	147,7 Triliun Rupiah	1.931,2 Triliun Rupiah	Lebih Rendah dari capaian Provinsi (147,7 Triliun) dan Nasional (1.931,2 Triliun Rupiah)
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Rp1.080.667	Rp1.125.500	Rp1.066.833	Lebih rendah dari Provinsi (Rp1.125.500), namun lebih tinggi dari Nasional (Rp1.066.833).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	5,96	4,98	5,33	Lebih tinggi dari Provinsi (4,98) dan Nasional (5,33)
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	148,88 kg/kapita/ tahun	144,45 kg/kapita / tahun	140,60 kg/kapita/ tahun	Lebih tinggi dari Provinsi (144,45) dan Nasional (140,60).
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	113,73	113,29	123,26	Lebih tinggi dari Provinsi (113,73), lebih rendah dari Nasional (123,26)
Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	81,19	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89,37%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,26%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,10%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Persentase Rumah Layak Huni	54,15%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	81,47	93,00	96,414	Lebih rendah dari Provinsi (93,00).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	8,85	8,06	2,68	Lebih tinggi dari Provinsi (8,06) dan Nasional (2,68)
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	0,33%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	69,64	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	74,21	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Indeks Kualitas Udara	71,66	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Indeks Kualitas Lahan	58,05	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	103,85	108,36	-	Lebih rendah (lebih baik) dari Rata-rata Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur (108,36).
Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**90,90%**	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	58,30%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	73,00	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	76,97%	-	-	Tidak ada Pembanding Data

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tujuan : **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0,78	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	97,38%	92,67%	58,57%	Lebih Tinggi dari Provinsi (92,67%) dan Nasional (58,57%).

Keterangan:

Kategori Posisi	Jumlah Indikator (Dibanding Provinsi)	Jumlah Indikator (Dibanding Nasional)
Lebih Tinggi	11	13
Lebih Rendah	13	11
Sama	2	2
Tidak Ada Pembanding	17	17
TOTAL	**43**	**43**

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tabel 6 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan, alternatif solusi, dan rencana tindak lanjut

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri yang menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah dan program peningkatak akses serta pemerataan layanan pendidikan; 2. Ketersediaan satuan pendidikan dan Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) di hamper seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri sebagai usaha Menunjang peluang anak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah; 3. Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dan Data ATS yang optimal sebagai dasar perencanaan program intervensi termasuk penargetan bantuan pendidikan. 4. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu usaha membantu menekan risiko putus sekolah; 5. Partisipasi orang tua, lemabga sosial dalam mendorong anak tetap bersekolah; 6. Kesadaran masyarakat	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan. 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah; 5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 7. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C. 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan. 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa) 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri. 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan SDM : kegiatan pelatihan diperluas dan disempurnakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		terhadap pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. 7. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan kompeten : mendukung mutu dan keberlangsungan pelayanan kesehatan. 8. Adanya program peningkatan kapasitas SDM (pelatihan, diklat, sertifikasi) 9. Dukungan anggaran untuk pengembangan SDM 10. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah : memperkuat arah dan pelaksanaan pembangunan kesehatan 11. Kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan : mendukung peningkatan kualitas SDM kesehatan. 12. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan 13. Perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan di tingkat desa/kecamatan : mendorong pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan.	kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. 8. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan. 9. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 10. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. 11. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan.	7. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 8. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. 9. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan. 10. Koordinasi dengan pemerintah pusat : menyelaraskan kebijakan dan program kesehatan. 11. Kerja sama lintas sektor : memperkuat dukungan pelaksanaan program kesehatan. 12. Pemanfaatan teknologi digital kesehatan : meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.	8. Evaluasi kinerja dan kebutuhan tenaga kesehatan : memastikan kecukupan dan pemerataan SDM. 9. Penguatan sistem manajemen SDM : mekanisme pengelolaan tenaga kesehatan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien. 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan SDM : kegiatan pelatihan diperluas dan disempurnakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. 11. Evaluasi kinerja dan kebutuhan tenaga kesehatan : memastikan kecukupan dan pemerataan SDM. 12. Penguatan sistem manajemen SDM : mekanisme pengelolaan tenaga kesehatan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri yang menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah dan program peningkatak akses serta pemerataan layanan pendidikan; 2. Ketersediaan satuan pendidikan dan Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) di hamper seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri sebagai usaha Menunjang peluanganak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah; 3. Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dan Data ATS yang optimal sebagai dasar perencanaan program intervensi termasuk penargetan bantuan pendidikan; 4. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu usaha membantu menekan risiko putus sekolah; 5. Partisipasi orang tua, lemabga sosial dalam mendorong anak tetap bersekolah; 6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup.	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan. 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah; 5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Perpindahan penduduk usia sekolah ke luar daerah dan/atau ke sektor kerja informal menyebabkan tidak tercatatnya kelanjutan pendidikan dalam sistem pendidikan daerah.	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C; 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan; 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan anak berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah; 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa); 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Rata-Rata Lama Sekolah	1. Konsistensi kebijakan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dalam mendorong peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar seta penguatan layanan pendidikan formal dan nonformal; 2. Optimalisasi pendidikan nonformal melalui program Paket A, B dan C melalui PKBM memberikan kesempatan bagi penduduk usia dewasa dan anak putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan; 3. Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan Dapodik dan Data Anak Tidak Sekolah sebagai dasar perencanaan program meningkatkan ketepatan sasaran intervensi pendidikan. 4. Dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menekan angka putus sekolah dan mendorong masyarakat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai modal peningkatakan kualitas hidup; 3. Peran lembaga pendidikan nonformal (PKBM), organisasi	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan; 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah; 5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Perpindahan penduduk usia sekolah ke luar daerah dan/atau ke sektor kerja informal menyebabkan tidak tercatatnya kelanjutan pendidikan dalam sistem pendidikan daerah.	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C; 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan; 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan anak berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah; 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa); 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		kemasyarakatan dalam memfasilitasi pendidikan bagi kelompok usia dewasa dan masyarakat yang sebelumnya belum pernah mendapatkan pendidikan dan sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan.			

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan : kemudahan menjangkau rumah sakit, puskesmas, dan klinik 2. Tenaga kesehatan yang memadai 3. Penggunaan alat medis dan ketersediaan obat-obatan esensial 4. Program promotif dan preventif 5. Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan program kesehatan 7. Dukungan lintas sektor 8. Tingkat pendapatan : memungkinkan akses ke nutrisi yang lebih baik dan biaya pengobatan 9. Stabilitas Ekonomi : mempengaruhi kemampuan Pemda dalam membangun infrastruktur kesehatan 10. Tingkat Pendidikan : orang yang berpendidikan lebih paham pada kesadaran akan gaya hidup sehat 11. Faktor sosial dan gaya hidup: - Aktivitas fifik : rutin berolah raga menjaga fungsi jantung dan metabolisme - Kesehatan mental : dukungan sosial yang kuat dan tingkat stress yang rendah akan memperpanjang umur - Penghindaran zat berbahaya	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Kualitas layanan yang belum merata 3. Keterbatasan tenaga kesehatan 4. Pola hidup dan kebiasaan buruk : konsumsi zat adiktif (merokok, narkoba, konsumsi alkohol), pola makan tidak sehat (konsums tinggi gula, garam, dan lemak jenuh yang memicu obesitas serta penyakit kardiovaskuler), kurang aktivitas fisik (kurang gerak yang mempercepat penurunan fungsi tubuh) 5. Kesehaatn mental : kondisi psikologis seperti depresi berat atau stress kronis yg tidak tertangani 6. Literasi Kesehatan yang rendah : ketidak tahuan individu mengenai gejal awal penyakit sehingga terlambat mencari pertolongan medis 6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat - Kemiskinan : membatasi kemampuan orang untuk membeli makanan bergizi dan mendaptkan hunian yang layak/sehat - Tingkat Pendidikan rendah : mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan pencegahan penyakit 7. Faktor lingkungan dan sanitasi - Kurangnya akses air bersih dan sistem pembuangan limbah yang buruk	1. Peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan : sarana dan prasarana diperbaiki untuk menjamin kualitas pelayanan yang sesuai standar. 2. Penempatan tenaga kesehatan ke wilayah prioritas : distribusi SDM diatur agar layanan dapat dijangkau secara merata di seluruh wilayah. 3. Penguatan layanan promotif dan preventif 4. Penguatan peran masyarakat : keterlibatan aktif warga difasilitasi agar program kesehatan lebih berdampak dan berkelanjutan. 5. Sinergi lintas sektor : kolaborasi antara berbagai pihak dijalankan untuk menyelenggarakan program secara terpadu. 6. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan : upaya dilakukan agar masyarakat dari seluruh lapisan dan wilayah dapat memperoleh pelayanan secara optimal.	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan : standar pelayanan diterapkan di seluruh wilayah untuk memastikan mutu setara. 2. Penguatan sistem rujukan : prosedur rujukan disempurnakan agar alur pelayanan pasien lebih terstruktur dan efektif. 3. Monitoring dan evaluasi layanan kesehatan : pengawasan dan penilaian dilakukan secara rutin untuk menilai kinerja serta hasil program. 4. Penguatan peran masyarakat : keterlibatan aktif warga difasilitasi agar program kesehatan lebih berdampak dan berkelanjutan. 5. Sinergi lintas sektor : kolaborasi antara berbagai pihak dijalankan untuk menyelenggarakan program secara terpadu. 6. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan : upaya dilakukan agar masyarakat dari seluruh lapisan dan wilayah dapat memperoleh pelayanan secara optimal.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
			8. Hambatan transportasi ke fasilitas kesehatan ruas terpencil.		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Tersedianya sumber daya manusia pelaksana program ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan informasi pasar kerja dan penempatan 3. Terselenggaranya kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung peningkatan kompetensi 4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja dan industri 5. Ketersediaan lapangan kerja dan daya serap dunia usaha/industry	1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja 2. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif 3. Ketidaksesuaian kompetensi dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industry 4. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan 2. Optimalisasi program ketenagakerjaan agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja 3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui job fair dan layanan informasi ketenagakerjaan E-Kerjo 4. Peningkatan koordinasi internal dalam penanganan hubungan industrial, penguatan kapasitas mediator hubungan industrial 5. Peningkatan kualitas perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan optimalisasi sarana prasarana pelatihan 6. Peningkatan koordinasi perencanaan tenaga kerja 7. Kerjasama dengan instansi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk penyelerasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja 8. Kerjasama dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan job fair, sosialisasi ketenagakerjaan, dan penyebarluasan informasi pasar kerja	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif dan akuntabel 2. Penguatan koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi dan pelaporan kinerja 4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1. Perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang mendorong peningkatan partisipasi penduduk usia kerja 2. Ketersediaan penduduk usia kerja yang didukung bonus demografi menjadi potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja 3. Ketersediaan peluang kerja di sektor formal dan informal 4. Dukungan dunia usaha dan industri dalam penyerapan tenaga kerja	1. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan peningkatan partisipasi angkatan kerja 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan ketenagakerjaan yang 3. Rendahnya tingkat keterampilan sebagian penduduk usia kerja 4. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia	1. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan efektivitas pencapaian target 2. Pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 3. Fasilitasi mediasi antara pekerja dan pengusaha 4. Penyebarluasan informasi lowonga kerja kepada masyarakat 5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data ketenagakerjaan 6. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 7. Penyebarluasan informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui media dan sistem informasi ketenagakerjaan	1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi lintas sektor mengenai peluang kerja, pelatihan, dan kewirausahaan bagi masyarakat usia kerja. 2. Pengembangan kolaborasi dengan instansi pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kelompok usia kerja yang belum aktif secara ekonomi agar berpartisipasi dalam kegiatan produktif 3. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam membuka akses kesempatan kerja dan program pemagangan 4. Evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama lintas instansi untuk memastikan efektivitas upaya peningkatan TPAK.
Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	1. Koordinasi dan Kerjasamayang solid di tingkat OPD; 2.Adanya bantuan DBHCHT yang meringankan beban ekonomi masyarakat; 3. Integritas pegawai; 4. Membaiknya ekonomi yang sempat terpuruk akibat COVID-19; 5. Kerjasama yang baik antar berbagai sektor terkait; 6. Perubahan juknis penyaluran dana bantuan sosial yang memudahkan penyaluran.	1. Program belum sepenuhnya berbasis evidence dan akar masalah; 2. Bidang pemberdayaan, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sering bekerja sendiri-sendiri; 3. Budaya kerja reaktif, bukan proaktif; 4. Bencana alam (banjir, kekeringan, gempa) yang meningkatkan jumlah penduduk miskin baru; 5. Intervensi politik di level bawah dalam penentuan sasaran bantuan; 6. Perlambatan ekonomi nasional/daerah yang menekan	1.membangun budaya untuk mengevaluasi berdasar evidence dan akar masalah; 2.Meningkatkan koordinasi antar bidang dan mengurangi egobidang; 3.Membuat jadwal untuk perbaikan data, moniting program dan pelatihan perubahan mindset; 4. Membangun buffer stock bantuan di kecamatan rawan bencana; 5. Membuat SOP penetapan sasaran yang transparan dan dapat diaudit; 6. Menggunakan data P3KE untuk memprioritaskan keluarga yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.	1. a. Menyusun Standard Evidence Requirement untuk setiap usulan program (data P3KE, DSEN, hasil FGD, problem tree). b. Membentuk Tim Analisis Data Kemiskinan lintas bidang untuk menyusun rekomendasi intervensi prioritas. c. Mengembangkan dashboard internal sederhana (Excel/Power BI) untuk memetakan kantong kemiskinan. d. Melakukan evaluasi tahunan berbasis data untuk menentukan program yang efektif dan yang perlu dihentikan. e. Melakukan pelatihan internal tentang evidence-based planning.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
			pendapatan rumah tangga.		2. a. Membentuk Tim Integrasi Layanan Kemiskinan dengan rapat koordinasi bulanan. b. Menyusun SOP alur layanan terpadu (asesmen → rujukan → intervensi → monitoring). c. Mengembangkan formulir rujukan digital internal untuk mempercepat koordinasi antarbidang. d. Menyusun paket intervensi terpadu untuk kasus tertentu (misal: keluarga miskin dengan ODGJ, disabilitas, lansia). e. Melakukan case conference rutin untuk kasus kompleks. 3. a. Menyusun Early Warning System berbasis indikator (harga pangan, pengaduan, data P3KE). b. Membuat kalender kerja proaktif: jadwal verifikasi data, monitoring lapangan, evaluasi program. c. Mengadakan innovation challenge internal untuk mendorong ide perbaikan layanan. d. Melakukan pelatihan service excellence, design thinking, dan manajemen perubahan. e. Menetapkan indikator kinerja individu yang mendorong kerja proaktif. 1. a. Menjalankan program pemulihan ekonomi pascabencana (cash for work, bantuan usaha, pelatihan singkat). b. Melakukan simulasi penanganan bencana bersama BPBD dan kecamatan. 2. a. Menguatkan verifikasi berbasis data (DTKS, P3KE, musdes)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
					dengan SOP yang jelas dan transparan. b. Mengembangkan sistem pendaftaran dan pelacakan bantuan berbasis aplikasi untuk mengurangi intervensi manual. c. Melibatkan TKSK, pendamping, dan pihak ketiga sebagai pengawas independen. Melakukan publikasi daftar penerima bantuan (tanpa data sensitif) untuk meningkatkan akuntabilitas. • Melakukan sosialisasi kepada desa/kelurahan tentang mekanisme penetapan sasaran yang objektif. 3. a. Memperkuat program pemberdayaan ekonomi ultramikro (alat usaha, pelatihan singkat, akses pasar). b. Berkolaborasi dengan Disnaker, UMKM, dan swasta untuk membuka peluang kerja dan magang.
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	1. Ketersediaan dan kualitas SDM (kader KB) yang menunjang pencapaian; 2. Ketersediaan data survei yang update; 3. Perencanaan program yang terarah; 4. Komitmen pimpinan perangkat Daerah; 5. 1. Kolaborasi antar OPD (DPMPD, Dinsos, Bappeda); 6. Program propolis untuk masyarakat miskin;	1. Publikasi hasil survei belum update; 2. Advokasi hasil survei ke OPD terkait belum optimal; 3. Kondisi sosial ekonomi keluarga; 4. Daya beli masyarakat turun; 5. Advokasi data ke desa yang belum mendapat perhatian;	1. Publikasi data; 2. Rapat koordinasi; 3. Advokasi data ke OPD terkait.	1. Publikasi melalui website dan kader 2. Rapat koordinasi dengan OPD terkait (Disnaker, Perkim, DPMPD, Dinsos, dan Bappeda) 3. Koordinasi dengan DPMPD dan Dinsos

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Ketersediaan perangkat regulasi daerah yang Menunjang pelaksanaan demokrasi dan stabilitas sosial; 2. Kapasitas dan kompetensi aparatur dalam fasilitasi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan; 3. Koordinasi internal OPD yang relatif baik dalam Menunjang program harmonisasi sosial; 4. Peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan; 5. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan; 6. Dukungan Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.	1. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kegiatan demokrasi dan sosial politik; 2. Keterbatasan sumber daya teknis yang memiliki kompetensi khusus di bidang demokrasi dan politik; 3. Dinamika sosial dan politik yang berkembang cepat, terutama menjelang tahun politik; 4. Penyebaran informasi negatif dan hoaks di media sosial; 5. Perbedaan kepentingan kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.	1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berkala. 2. Optimalisasi peran aparatur melalui peningkatan kapasitas dan pembagian tugas yang jelas. 3. Penyesuaian prioritas kegiatan sesuai kemampuan anggaran 4. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan dialog publik. 5. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. 6. Sinergi dengan Forkopimda dalam penanganan isu strategis daerah	1. Penguatan perencanaan program berbasis kinerja dan hasil; 2. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis; 3. Pengembangan sistem pemantauan Indeks Demokrasi Indonesia secara periodik; 4. Peningkatan intensitas dialog sosial dan pendidikan demokrasi masyarakat. 5. Penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga vertikal dan organisasi masyarakat. 6. Edukasi publik terkait literasi informasi dan penguatan toleransi sosial.
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	1. Adanya program pembinaan wawasan kebangsaan dan toleransi beragama. 2. Dukungan kelembagaan dan struktur organisasi OPD yang relevan. 3. Pengalaman pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya 4. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. 5. Peran aktif lembaga keagamaan dan organisasi sosial. 6. Kondisi keamanan daerah yang relatif kondusif.	1. Terbatasnya jangkauan kegiatan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 3. Belum optimalnya dokumentasi dan evaluasi kegiatan 4. Masih adanya potensi konflik sosial berbasis perbedaan pandangan. 5. Pengaruh negatif media sosial terhadap sikap toleransi. 6. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat	1. Sosialisasi bertahap 2. Optimalisasi sarpras 3. Koordinasi internal 4. Pelibatan tokoh 5. Kerja sama lembaga 6. Pendekatan persuasif	1. Program berkelanjutan 2. Perencanaan & evaluasi 3. Basis data kondusivitas 4. Sinergi Forkopimda 5. Edukasi publik 6. Forum dialog

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	1. Koordinasi Tim RB yang berjalan sesuai jadwal 2. Koordinasi dengan Tim Kerja Tematik yang berjalan dengan baik 3. Format penginputan data Realisasi RB dari Kementerian PANRB yang sesuai dengan Struktur Perencanaan Pemda. 4. Format Penginputan menggunakan excel. 5. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 6. Ketersediaan regulasiinternal (Perbup, SK SOP) yang mendukung pelaksanaan RB; 7. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin baik; 8. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, termasuk kompetensi, integritas, dan profesionalisme ASN; 10. Pemanfaatan teknologi informasi dan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	1. Sebagian pelaksaan aksi belum sesuai jadwal 2. Terdapat penyesuaian Rencana Aksi sesuai Perubahan Perencanaan 3. Perubahan Peraturan Teknis tentang RB yang belum tersosialisasikan dengan baik 4. Penjabaran terkait Kegiatan Utama RB General dan RB Tematik yang belum diperinci karena masih dalam masa transisi. 5. Perpres Grand Design Reformasi Birokrasi yang masih proses penyusunan belum tersosialisasikan. 6. Belum meratanya pemahaman Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah; 2. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja di sebagian aparatur; 7. Keterbatasan SDM pengelola RB yang kompeten dan konsisten; 8. Kualitas data dukung RB yang belum seragam antar perangkat daerah; 9. Beban administrasi yang tinggi sehingga fokus pada RB belum optimal; 10. Perubahan kebijakan dan indikator penilaian RB dari pemerintah pusat yang cukup dinamis; 11. Keterbatasan fiskal daerah yang mempengaruhi dukungan anggaran RB; 12. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik;	1. Menyesuaikan ulang Rencana Aksi sesuai target baru; 2. Menyesuaikan format rencana aksi dengan peraturan yang disesuaikan; 3. Penguatan peran Tim Reformasi Birokrasi Daerah melalui pembentukan tim, pembagian tugas, dan koordinasi lintas perangkat daerah; 4. Penyelarasan pelaksanaan RB dengan SAKIP, SPBE, dan Zona Integritas agar perencanaan, penganggaran, dan kinerja terintegrasi; 5. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi internal berupa Perbup, SK, dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan RB; 6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan teknis pengisian LKE RB; 7. Monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan pemenuhan indikator dan kualitas data dukung RB. 8. Pemanfaatan kebijakan dan pedoman RB dari Kementerian PANRB sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi; 9. Pendampingan dan asistensi dari pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan RB; 10. Tindak lanjut atas rekomendasi lembaga pengawas eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman; 11. Respon terhadap tuntutan dan masukan masyarakat terkait peningkatan kualitas tata kelola dan	1. Menyusun Rencana Aksi dengan model cascading dan pohon kinerja; 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait; 3. Penguatan peran dan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Daerah sebagai pengendali utama pelaksanaan RB lintas perangkat daerah; 4. Peningkatan kualitas dan konsistensi data dukung RB melalui standarisasi dokumen dan quality control internal. 5. Integrasi RB ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar seluruh program/kegiatan mendukung sasaran RB; 6. Penguatan budaya kinerja dan budaya melayani ASN melalui internalisasi nilai ASN BerAKHLAK dan penegakan disiplin; 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi layanan dengan penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
			13. Perkembangan teknologi yang cepat, tidak selalu diikuti kesiapan infrastruktur dan SDM.	pelayanan publik.	
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	1. Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP 2. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang selaras 3. Keterlibatan stakeholder dalam implementasi SAKIP 4. Akurasi dan ketepatan waktu rilis data yang berasal dari BPS	1. Pengembangan aplikasi e-sakip Pemkab belum maksimal 2. Komponen perencanaan yang ditetapkan dalam laporan kinerja belum cukup menggambarkan kinerja, seringkali tidak relevan, sulit diukur, tidak berfokus pada outcome (dampak nyata) 3. Ketergantungan Data pada Instansi Lain – data yang dikeluarkan oleh BPS	1. Penguatan komitmen pimpinan 2. Penyesuaian dokumen terhadap hasil evaluasi AKIP 3. Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan 4. Kolaborasi Lintas Sektor	1. Melakukan Reviu pada dokumen perencanaan 2. Menindaklanjuti hasil rekomendasi SAKIP bersama dengan Tim SAKIP 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah 4. Berkoordinasi dengan pihak terkait.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	I K M	1. Perbaikan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan yang dilaksanakan terus menerus 2. Beroperasinya MPP Kabupaten Kediri 3. Berbagai inovasi pelayanan dilaksanakan antara lain pada layanan adminduk, layanan perizinan, pendidikan, kesehatan dan sosial 4. Digitalisasi layanan publik pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau dan terpercaya. 5. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik melalui kegiatan Forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh UPP. Pelibatan masyarakat membantu penyelenggara untuk mengetahui kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah, sehingga mendukung kepuasan masyarakat.	1. Keterbatasan anggaran 2. Inovasi pelayanan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh UPP 3. Terjadinya aksi massa yang menyebabkan kerusakan sebagian fasilitas pelayanan publik Kabupaten Kediri	1. Pembinaan kepada UPP terkait peningkatan kualitas pelayanan 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEPKPPP) 3. Pembangunan kembali atau rehabilitasi fasilitas publik yang rusak atau terdampak aksi massa. 4. Pembinaan terkait penyelenggaraan survey SKM melalui aplikasi SKM Online	1. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh UPP; 2. Pelaksanaan, pembinaan pada seluruh UPP terkait aplikasi SKM Online

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Opini BPK terhadap LKPD	1. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang di BKAD Kabupaten Kediri, didukung dengan sistem pengelolaan dokumen keuangan dan aset yang rapi, terstruktur, serta terdokumentasi dengan baik, sehingga proses administrasi pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan efisien; 2. Proses perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan riil serta melalui mekanisme verifikasi dan checking berlapis, sehingga mampu menekan peningkatan nilai SiLPA dibandingkan tahun sebelumnya dan menjaga keselarasan antara perencanaan anggaran dan realisasi; 3. Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk kegiatan penguatan sistem, pembinaan OPD, dan penyusunan laporan keuangan; 4. Pengawasan pengelolaan kas daerah dan arus kas yang ketat dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga likuiditas daerah, ketepatan waktu pembayaran, serta	1. Potensi keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah karena memerlukan koordinasi intensif lintas perangkat daerah, koreksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bappeda; 2. Potensi keterlambatan proses pencairan dana, ketidaksinkronan dokumen pencairan dengan anggaran kas, serta keterlambatan pelaporan keuangan pada akhir tahun anggaran oleh sebagian perangkat daerah; 3. Potensi keterlambatan penyampaian laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari perangkat daerah kepada BKAD Kabupaten Kediri. 4. Tingkat partisipasi sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assessment) yang fluktuatif, sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyusunan LKPD akibat tidak optimalnya mekanisme deteksi dini atas potensi kesalahan atau data bias. 5. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan teknologi informasi (IT) di lingkungan BKAD Kabupaten Kediri, khususnya dalam mendukung pengelolaan sistem keuangan	1. koordinasi dan komunikasi lintas bidang di BKAD Kabupaten Kediri melalui rapat teknis rutin, pembentukan grup koordinasi lintas bidang (anggaran daerah, perbendaharaan, pengelolaan BMD, dan akuntansi), serta standarisasi alur administrasi dan pengelolaan dokumen guna memastikan keseragaman pemahaman dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. 2. Penyempurnaan perencanaan dan pengendalian anggaran berbasis realisasi historis BKAD Kabupaten Kediri telah menerapkan proses checking dan reviu berlapis terhadap perencanaan anggaran dengan membandingkan tren realisasi tahun sebelumnya, sehingga deviasi antara anggaran dan realisasi dapat ditekan serta nilai SiLPA lebih terkendali. 3. Optimalisasi pengawasan pengelolaan kas dan arus kas daerah dilakukan melalui monitoring harian posisi kas, penyusunan proyeksi arus kas yang lebih akurat, serta sinkronisasi jadwal pencairan dengan rencana kebutuhan belanja SKPD untuk mencegah penumpukan kas dan keterlambatan pembayaran. 4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan pembinaan teknis dan reviu internal terhadap penerapan SAP dalam setiap	1. Penerapan cut-off time penyusunan dan reviu secara berkala terhadap rancangan KUA-PPAS, KUPA-PPAS, dan Rancangan APBD oleh BKAD Kabupaten Kediri. 2. Pelaksanaan early warning system paling lambat H-1 bulan sebelum akhir tahun anggaran kepada unit keuangan SKPD, percepatan proses pengajuan dan verifikasi berkas, serta optimalisasi peran seluruh pegawai bidang pengampu dengan dukungan lintas bidang apabila diperlukan; 3. Pelaksanaan reviu berkala atas laporan Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan data aset daerah; 4. Pelaksanaan rekonsiliasi ICSA secara rutin setiap bulan terhadap unit keuangan SKPD, meliputi penerimaan, kas, aset, dan akuntansi, sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 5. Penerapan reward and punishment bagi unit keuangan SKPD terkait keaktifan dalam proses rekonsiliasi ICSA, termasuk kebijakan administratif berupa penundaan pencairan SP2D (sebagai rencana jangka pendek Tahun 2025); 6. Penguatan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai dengan kompetensi IT, partisipasi aktif dalam webinar yang diselenggarakan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		meminimalisir potensi idle cash; 5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap tahapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Kabupaten Kediri; 6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terintegrasi melalui aplikasi e- BMD, mencakup proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan, sehingga pencatatan aset daerah menjadi terpadu, terintegrasi, dan real time 7. Dukungan regulasi nasional di bidan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan SAP dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan BPK; 8. Pembinaan dan pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta webinar kelas gratis dari Kemenkeu RI, Kemendagri, maupun sinergitas antar Kementerian yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; 9. Dukungan sistem informasi	berbasis aplikasi. 6. Belum optimalnya integrasi data dan sistem pada aplikasi SIPD Kemendagri, yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara data yang tercatat pada sistem dengan kondisi riil pelaksanaan di daerah; 7. Perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan adaptasi cepat dari pemerintah daerah; 8. Ketergantungan pada ketepatan waktu penyampaian data dan laporan dari seluruh perangkat daerah.	tahapan penyusunan laporan keuangan guna menjaga kesesuaian pencatatan dengan regulasi yang berlaku; 5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-BMD dalam pengelolaan BMD baik seluruh proses penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan aset daerah telah direkam secara terintegrasi melalui e-BMD untuk mendukung ketertiban administrasi dan keandalan data aset dalam LKPD; 6. Pelaksanaan rekonsiliasi Internal Control Self Assessment (ICSA) merupakan pelaksanaan rekonsiliasi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kesalahan pencatatan keuangan dan aset sebelum proses penyusunan LKPD. 7. Koordinasi intensif dengan SKPD terkait percepatan penyampaian laporan keuangan dan BMDBKAD Kabupaten Kediri telah melakukan pendekatan persuasif dan asistensi teknis kepada SKPD agar penyampaian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. 8. Penyesuaian dan adaptasi terhadap pengembangan Aplikasi SIPD Kemendagri dilakukan melalui sinkronisasi data secara berkala, klarifikasi teknis dengan pihak bersangkutan, serta penyesuaian prosedur internal untuk	Kemendagri/Kemenkeu, serta pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. 7. Penguatan koordinasi dengan Kemendagri terkait optimalisasi dan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIPD; 8. Penyesuaian kebijakan dan prosedur internal BKAD Kabupaten Kediri terhadap perkembangan regulasi nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah; 9. Penguatan komunikasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan data dan laporan yang dibutuhkan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		nasional (SIPD Kemendagri) sebagai platform utama perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah		meminimalisir ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi riil. 9. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah lintas SKPD telah memfasilitasi dan mendorong partisipasi aparatur pengelola keuangan dalam kegiatan bimbingan teknis, webinar, dan pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Komitmen dan kerjasama APIP dalam pemenuhan dokumen kelengkapan penilaian MCSP; 2. Ketersediaan data APIP yang memadai; 3. Komitmen/Dukungan Bupati dalam pelaksanaan penilaian MCSP; 4. Kerjasama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pemenuhan dokumen penilaian MCSP.	1. Penugasan mandatory MCSP KPK tidak selesai seluruhnya sesuai waktu yang ditentukan oleh KPK; 2. Pelaporan MCSP mendekati injury time dengan timeline; 3. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD untuk meminimalisir potensi KKN; 4. Kurangnya integritas individu pelaksana kegiatan terkait pencegahan korupsi; 5. Adanya temuan terkait dengan kelebihan pembayaran; 6. Belum seluruh pegawai mendapatkan sosialisasi anti korupsi; 7. Budaya Anti Korupsi masih lemah;	1. Peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan monitoring MCSP sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Surat Tugas; 2. Peningkatan ketepatan waktu pelaporan mandatory MCSP; 3. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Kepala OPD dan perwakilan setiap OPD; 4. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara berkala.	1. Penyusunan timeline pada Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. Penyusunan Perencanaan Pelaporan mandatory MCSP n+1; 3. Penyusunan rencana Sosialisasi kepada seluruh pegawai; 4. Pembentukan tim tindak lanjut hasil pengawasan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	1. Terselenggaranya berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui diklat klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring; 2. Penilaian kinerja ASN telah dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan dan menjadi dasar pembinaan kinerja; 3. Adanya pembinaan dan pengawasan disiplin ASN dengan melakukan monitoring dan secara berkala; 4. ASN semakin menyadari bahwa pendidikan lanjutan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas aparatur.	1. Masih terdapat ASN yang belum memenuhi ketentuan minimal jam pengembangan kompetensi; 2. Dukungan dan konsistensi pelaksanaan pembinaan ASN antar OPD masih bervariasi.	1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai bentuk pelatihan sesuai kebutuhan organisasi dan individu ASN; 2. Mendorong pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin.	1. Menyusun peta kompetensi dan rencana pengembangan ASN secara berkelanjutan; 2. Melaksanakan evaluasi internal untuk memastikan peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan.
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	1. Semua Indikator menjadi kekuatan dengan ada nya perbup Nomor 24 tahun 2023 yang merupakan hasil tindak lanjut dari reviu terhadap Perbup 33 tahun 2019. 2. Dokumen arsitektur, peta rencana, keterpaduan rencana anggaran spbe, kematangan inovasi 3. Proses bisnis tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari hasil review dokumen SPBE 2019. 4. Semua indicator merupakan kekuatan karena telah melakukan pengembangan Aplikasi SPBE secra berkesinambungan, keterpaduan dan integrasi	1. Kurangnya Mekanisme Pemantauan & Evaluasi (Monev) Berkala. 2. Rekomendasi dari auditor tahun lalu belum dieksekusi atau tidak ada dokumen "Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Audit". Penilai melihat audit hanya sebagai formalitas tahunan, bukan instrumen perbaikan.	1. Membuka kanal pengaduan atau survei kepuasan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan fitur evaluasi layanan. 2. Membuat Berita Acara Tindak Lanjut Tahap I untuk poin-poin yang sudah diselesaikan.	1. Menyusun dan menetapkan SOP Penanganan Keluhan Digital yang mencantumkan Service Level Agreement (SLA). Misalnya: Keluhan teknis harus ditanggapi dalam 1x24 jam. 2. Mengumpulkan screenshot sistem, dokumen kebijakan/SOP yang telah ditandatangani, atau foto infrastruktur yang telah diperbaiki.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		aplikasi. Juga sudah memliki prosedur pengoperasian baku pusat data di seluruh unit perangkat daerah dan SLA, interkoneksi dan akses dengan jaringan intra Pemerintah Provinsi Jatim. Sudah dilakukan reviu dan ditindaklanjuti. 5. Semua indicator merupakan kekuatan karena sudah mempunyai tim koordinasi SPBE yang meliputi dari berbagai unsur dan sudah punya tupoksi sudah dijalankan dengan sangat baik. 6. Manajemen Resiko, manajemen Keamanan Sistem informasi, manajemen data, dan manajemen asset TIK sudah diterapkan dengan sangat baik dan dilakukan reviu serta ditindaklanjuti. 7. Sudah melakukan audit internal untuk audit keamanan berdasarkan pedoman BSSN dan ISO. 8. Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti SIPD, SPSE, LPSE, Simpegnas, MyASN, Srikandi, e-BMD,sakip, yang Sebagian sudah terintegrasi satu sama lain. 9. Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti LAPOR, SP4N, Aplikasi JDIH nasional, 10. OSS yang sudah			

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		terintegrasi menggunakan API, sudah dioptimalisasikan dan direviu.			
Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	1. Jumlah koperasi aktif dan usaha mikro yang bertambah; 2. Dukungan program pembinaan koperasi dan usaha mikro dari pemerintah daerah; 3. Perkembangan teknologi digital dan marketplace; 4. Kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih; 5. Kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui pasar rakyat, gudang, dan sarana distribusi yang memadai; 6. Fasilitas yang memadai dan penyederhanaan perizinan usaha perdagangan dan perizinan ekspor barang; 7. Adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang beredar (takaran, mutu,label,dan legalitas) guna melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat; 8. Kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting 9.Terjaminnya ketersediaan pasokan bahan kebutukan pokok dan penting 10. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang Menunjang kegiatan perdagangan 11. Adanya perkembangan	1. Rendahnya kapasitas manajemen dan tata kelola koperasi 2. Kurangnya inovasi produk dan kemasan 3. Persaingan dengan produk skala besar dan produk impor 4. Fluktuasi harga bahan baku 5. Perubahan pola konsumsi masyarakat 6. Ketergantungan pada kondisi ekonomi nasional 7. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri (tingginya biaya distribusi, kurang promosi) 8. Rendahnya produktivitas industri (tingginya ketergantungan bahan baku impor, belum ada kawasan industri); 9. Belum optimalnya sistem informasi & pelaporan secara rutin kegiatan industry ke dalam aplikasi SIINAS (data belum terintregasi); 10. Belum optimalnya standardisasi, desain, dan teknologi industri (produk IKM belum SNI, desain/kemasan lemah, teknologi rendah) 5. Pameran tidak bisa menampung semua potensi dari UMKM yang ada 12. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	1. Pelatihan manajemen usaha, akuntansi sederhana, dan kewirausahaan; 2. Pendampingan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan; 3. Fasilitasi sertifikasi produk (NIB, PIRT, Halal); 4. Kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro; 5. Promosi produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dan digital marketing; 6. Kemitraan dengan pelaku usaha besar; 7. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi; 8. Peningkatan kegiatan promosi perdagangan; 9. Peningkatan kerja sama antara IKM/UMKM dengan penyedia bahan baku; 10. Peningkatan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada para pelaku usaha; (IKM/UMKN) terhadap terhadap proses pelaporan kegiatan secara rutin ke dalam aplikasi SIINAS; 11. Peningkatan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada para pelaku usaha (IKM/UMKN) terhadap standardisasi produk, desain, dan teknologi produk IKM/UMKM; 12. Peningkatan volume kegiatan promosi dagang baik lokal maupun nasional	1. Penguatan koperasi sektor riil dan usaha mikro produktif; 2. Peningkatan kualitas dan daya saing produk koperasi dan usaha mikro; 3. Digitalisasi koperasi dan usaha mikro; 4. Perluasan akses pembiayaan dan pasar; 5. Sinkronisasi program daerah dan pusat di sektor koperasi dan UM; 6. Penguatan jejaring kemitraan usaha; 7. Pemanfaatan teknologi dan platform digital nasional; 8. Revitalisasi dan modernisasi sarana distribusi dan pas; 9. Stabilisasi harga dan penguatan cadangan barang pokok; 10. Penguatan sistem informasi dan kebijakan berbasis data; 11. Peningkatan standardisasi, desain, dan teknologi produk IKM; 12. Peningkatan produktivitas dan pembangunan kawasan industri; 13. Stabilisasi harga dan penguatan cadangan barang pokok; 14. Fasilitasi dan promosi ekspor produk unggulan; 15. Penguatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		teknologi dan digitalisasi perdagangan (marketplace)	(kurangnya ketersediaan)	13. Stabilisasi harga melalui kegiatan Operasi Pasar dan penguatan cadangan barang pokok; 14. Peningkatan daya saing produk dan peningkatan akses serta fasilitas ekspor; 15. Penguatan UU Perlindungan Konsumen.	
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui sistem OSS dan penyederhanaan prosedur perizinan (SKM: 89,52) 2. Koordinasi OPD dalam fasilitasi dan pengawalan realisasi investasi 3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mendorong investasi daerah 4. Peluang potensi daerah yang disusun dalam Investment Project Ready to Offer (I-PRO)	1. Ketergantungan pada proyek investasi tertentu yang bernilai besar seperti PSN 2. Belum optimalnya integrasi perencanaan investasi dengan perangkat daerah teknis, khususnya terkait infrastruktur pendukung, ketenagakerjaan 3. Belum optimalnya promosi investasi yang bersifat berbasis proyek siap tawar 4. Keterbatasan informasi kesiapan lahan investasi (kepastian tata ruang, status kepemilikan, dan perizinan dasar) 5. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi, khususnya dengan kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah memiliki kawasan industri matang dan infrastruktur lengkap	1. Peningkatan koordinasi internal dan lintas perangkat daerah dalam fasilitasi investasi 2. Peningkatan kualitas promosi investasi 3. Pemutakhiran data potensi serta peluang investasi daerah (SIDAPOTIK) 4. Penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Investasi/ BKPM 5. Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi di tingkat regional East Java Investment Forum 2025 (EJIF)	1. Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan penanaman modal. 2. Penguatan perencanaan promosi investasi 3. Penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi 4. Mendorong keterlibatan pelaku usaha dan asosiasi dalam pengembangan investasi daerah melalui kegiatan FKP 5. Adaptasi kebijakan dan strategi peningkatan investasi dari Kabupaten/ Kota yang telah berhasil meningkatkan investasinya.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1. Usaha mikro sebagai sumber pendapatan masyarakat; 2. Tersedianya lapangan kerja di sektor koperasi dan usaha mikro; 3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat; 4. Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 5. Akses pasar yang semakin luas; 6. Pertumbuhan ekonomi nasional; 7. Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai dan sesuai standar 8. Meningkatnya kegiatan promosi dagang baik secara langsung maupun digital; 9. Kemudahan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat; 10. Kenaikan tingkat upah dan pendapatan masyarakat; 11. Meningkatnya kemudahan akses Masyarakat terhadap barang kebutuhan dengan harga yang lebih kompetitif; 12. Kestabilan kondisi sosial & kebijakan ekonomi.	1. Skala usaha koperasi dan usaha mikro yang masih kecil; 2. Pendapatan pelaku usaha yang belum stabil; 3. Rendahnya produktivitas usaha; 4. Daya beli masyarakat yang fluktuatif; 5. Persaingan harga dengan produk massal; 6. Dampak kondisi ekonomi global; 7. Kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum sesuai SNI (pasar tradisional kumuh, bangunan lama); 8. Kurangnya kegiatan promosi dagang lokal dan promosi dagang nasional; 9. Produk yang tidak memenuhi standar (mutu, keamanan, SNI, halal, label); 10. Perubahan pola Konsumsi dan Gaya Hidup; 11. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat; 12. Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.	1. Penguatan koperasi sebagai sarana distribusi dan pemasaran; 2. Pelatihan peningkatan produktivitas dan kualitas produk; 3. Pengembangan usaha mikro berbasis komunitas; 4. Kerja sama distribusi antar wilayah; 5. Promosi produk lokal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat; 6. Peningkatan kegiatan pasar murah; 7. Peningkatan pendampingan usaha berkelanjutan; 8. Sosialisasi Gerakan bangga buatan dalam negeri (produk lokal)	1. Peningkatan pendapatan pelaku koperasi dan usaha mikro; 2. Penguatan koperasi konsumsi dan koperasi produsen; 3. Pengembangan usaha mikro berorientasi pasar; 4. Keberlanjutan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; 5. Sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi; 6. Perluasan pasar produk koperasi dan usaha mikro; 7. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta; 8. Antisipasi dampak ekonomi makro terhadap daya beli; 9. Akan dilaksanakan kegiatan pameran yang berkualitas dengan memilih potensi yang menonjol untuk ditampilkan; 10. Akan memberikan Bantuan teknis dan fasilitasi pendaftaran serta edukasi standardisasi, desain, dan teknologi produk IKM; 11. Pengembangan perdagangan dalam negeri berbasis produk lokal; 12. Akan melakukan penguatan branding produk lokal; 13. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah secara rutin.
Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	1. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, melalui penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, dan intensifikasi lahan. 2. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana	1. Rendahnya produktivitas sebagian komoditas pertanian, akibat keterbatasan penerapan teknologi dan praktik budidaya yang belum optimal. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, seperti	1. Peningkatan produktivitas pertanian, melalui penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian OPT. 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk	1. Pengembangan teknologi budidaya spesifik lokasi, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani sesuai karakteristik wilayah. 2. Peningkatan intensitas pemanfaatan alsintan dan sarana

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta fasilitas pascapanen. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan petani. 4. Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha pertanian, termasuk kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani. 5. Efisiensi biaya produksi dan pengelolaan usaha tani, sehingga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. 6. Kondisi alam dan iklim yang relatif mendukung, termasuk curah hujan, kesuburan tanah, dan ketersediaan sumber daya air. 7. Stabilitas dan peningkatan harga komoditas pertanian, yang mendorong peningkatan nilai produksi sektor pertanian. 8. Peningkatan permintaan pasar terhadap produk pertanian, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan industri.usaha. 9. Perkembangan teknologi dan inovasi pertanian, yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 10. Dukungan lembaga eksternal, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi,	jaringan irigasi yang belum memadai, jalan usaha tani, serta fasilitas pascapanen. 3. Kualitas sumber daya manusia pertanian yang masih terbatas, terutama dalam penguasaan teknologi dan manajemen usaha tani. 4. Kelembagaan petani yang belum optimal, yang berdampak pada rendahnya posisi tawar dalam pemasaran hasil. 5. Tingginya biaya produksi usaha tani, terutama biaya sarana produksi dan tenaga kerja. 6. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yang meningkatkan risiko gagal panen dan menurunkan produksi. 7. Fluktuasi harga komoditas pertanian, yang menyebabkan ketidakpastian pendapatan petani. 8. Keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan usaha tani, terutama bagi petani kecil. 9. Persaingan dengan produk pertanian dari daerah lain atau impor, yang menekan harga jual hasil pertanian lokal. 10. Dampak bencana alam dan gangguan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit. 11. Kondisi ekonomi makro yang kurang stabil, yang dapat memengaruhi daya beli dan	perbaikan jaringan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pembangunan jalan usaha tani. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan petani secara berkelanjutan. 4. Penguatan kelembagaan petani, seperti pembinaan kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani 5. Peningkatan kualitas data dan perencanaan pertanian, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 6. Pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha dan industri, dalam rangka perluasan akses pasar dan peningkatan nilai jual produk pertanian. 7. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, untuk adopsi inovasi dan teknologi pertanian. 8. Penguatan perlindungan usaha tani, melalui asuransi pertanian dan mitigasi risiko bencana.	produksi, melalui pengelolaan terpadu dan penguatan unit pelayanan jasa alsintan. 3. Penguatan sistem penyuluhan berbasis kebutuhan petani, dengan fokus pada peningkatan produktivitas. 4. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pertanian, melalui pemutakhiran data produksi, luas tanam, dan harga sebagai dasar perencanaan dan evaluasi. 5. Peningkatan kualitas pascapanen dan pengolahan hasil, guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian. 6. Perluasan dan penguatan kemitraan usaha pertanian, dengan industri pengolahan, distributor, dan pelaku pasar untuk menjamin kepastian pasar. 7. Peningkatan kolaborasi riset terapan, bersama lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam penerapan inovasi dan teknologi tepat guna. 8. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi produk pertanian, termasuk pemanfaatan platform digital dan perdagangan antarwilayah. 9. Penguatan perlindungan usaha tani dan manajemen risiko, melalui perluasan kepesertaan asuransi pertanian dan peningkatan kesiapsiagaan bencana. 10. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan dan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		dan dunia usaha.	investasi di sektor pertanian.		komoditas unggulan pertanian.
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	1. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar). 2. Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan. 3. Peran lumbung pangan masyarakat untuk pengelolaan cadangan pangan masyakat. 4. Adanya data daerah rentan pangan 5. Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan. 6. Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri	1. Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang 2. Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama	1. Monitoring pasokan pangan secara berkala 2. Penguatan kapasitas kelompok pengelola lumbung pangan masyarakat 3. Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). 4. Koordinasi lintas sektor terkait faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan utama 5. Komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha penggilingan dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat	1. Penguatan data lokasi sasaran survei lapangan berkala atas pasokan pangan pada sentra produksi, distributor, dan titik konsumsi 2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan 3. Koordinasi lintas sektor yang lebih intensif dengan Dinas Pertanian serta instansi terkait mengenai produksi pangan utama. 4. Penguatan sistem distribusi pangan antarwilayah untuk menjamin pasokan saat produksi lokal menurun
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	1. Peningkatan produktivitas usaha tani, melalui penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, serta pemupukan dan pengendalian OPT yang tepat. 2. Efisiensi biaya produksi, termasuk penggunaan sarana produksi secara optimal dan penerapan mekanisasi	1. Produktivitas usaha tani yang masih rendah, akibat penerapan teknologi budidaya yang belum optimal. 2. Efisiensi biaya produksi yang belum tercapai, sehingga biaya input relatif tinggi dibandingkan pendapatan. 3. Kualitas dan mutu hasil pertanian yang belum seragam,	1. Peningkatan produktivitas usaha tani, melalui penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. 2. Efisiensi biaya produksi, melalui optimalisasi penggunaan sarana produksi dan penerapan mekanisasi pertanian.	1. Penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi dan komoditas, untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi usaha tani. 2. Penguatan mekanisasi dan efisiensi input produksi, melalui optimalisasi pemanfaatan alsintan dan pengendalian biaya sarana produksi.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		pertanian. 3. Peningkatan kualitas hasil pertanian, sehingga memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi. 4. Penguatan kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan gapoktan, yang meningkatkan posisi tawar petani. 5. Peningkatan kapasitas dan keterampilan petani, melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. 6. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian secara optimal, termasuk irigasi, alsintan, dan fasilitas pascapanen. 7. Penguatan kelembagaan petani, seperti kelompok tani dan gapoktan, yang meningkatkan posisi tawar petani. 8. Peningkatan kapasitas dan keterampilan petani, melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. 9. Pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian secara optimal, termasuk irigasi, alsintan, dan fasilitas pascapanen. 10. Semakin lama pengalaman semakin efisien dalam pengelolaan produksi 11. Tambahan alokasi kegiatan di Perubahan APBD 2025 dimana realisasinya terjadi di	sehingga harga jual relatif rendah. 4. Kelembagaan petani yang belum kuat, yang berdampak pada rendahnya posisi tawar dalam pemasaran hasil. 5. Keterbatasan kemampuan manajerial dan pencatatan usaha tani, yang menyulitkan pengendalian biaya dan perencanaan produksi. 6. Fluktuasi dan rendahnya harga jual komoditas pertanian, terutama pada saat panen raya. 7. Kenaikan harga sarana produksi pertanian, seperti pupuk, benih, pestisida, dan bahan bakar. 8. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, yang meningkatkan risiko gagal panen. 9. Keterbatasan akses pasar dan rantai distribusi yang panjang, yang menekan harga di tingkat petani. 10. Terbatasnya akses permodalan dan pembiayaan usaha tani, terutama bagi petani kecil. 11. Persaingan dengan produk pertanian dari daerah lain atau impor, yang menekan harga komoditas lokal. 12. Kurang meratanya pengetahuan dan ketrampilan teknis usaha perikanan diantara para pelaku usaha 13. Rendahnya Kemauan untuk berkembang dan berinovasi	3. Peningkatan kualitas dan mutu hasil pertanian, agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar. 4. Penguatan kelembagaan petani, seperti pembinaan kelompok tani dan gapoktan guna meningkatkan posisi tawar. 5. Peningkatan kapasitas petani, melalui penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan usaha tani. 6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, termasuk irigasi dan fasilitas pascapanen. 7. Peningkatan akses dan perluasan pasar hasil pertanian, melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan industri. 8. Penyediaan dan pengawasan distribusi sarana produksi, khususnya pupuk dan benih bersubsidi. 9. Mitigasi risiko usaha tani, melalui asuransi pertanian dan penanganan dampak perubahan iklim. 10. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dalam rangka penerapan inovasi dan teknologi pertanian. 11. Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan 12. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan usaha perikanan 13. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemuliaan induk	3. Peningkatan standar mutu dan kualitas hasil pertanian, melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan peningkatan penanganan pascapanen. 4. Peningkatan kualitas dan intensitas penyuluhan serta pendampingan usaha tani, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya. 5. Optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk pemeliharaan irigasi dan pemanfaatan fasilitas pascapanen secara berkelanjutan. 6. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan sarana produksi, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan ketepatan sasaran pupuk serta benih bersubsidi. 7. Penguatan kolaborasi riset terapan, bersama lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam penerapan inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. 8. Perluasan cakupan asuransi usaha tani, sebagai upaya perlindungan pendapatan petani dari risiko gagal panen dan dampak perubahan iklim. 1. Pelibatan anggota kelompok dalam bimbingan teknis/ pelatihan Dinas Perikanan 2. Penambahan alokasi anggaran

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		triwulan IV 12. Adanya alokasi bantuan sarana dan prasarana (benih, pakan, kolam, alat budidaya)	14. Harga jual ikan yang tidak stabil 15. Harga pakan yang cenderung terus naik karena pengaruh kurs mata uang rupiah terhadap dollar		untuk bimbingan teknis dan pelatihan 3. Bekerja sama dengan instansi vertikal untuk kegiatan pengembangan perikanan
Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	Faktor Internal 1. Kompetensi dan Profesionalisme SDM Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan efektivitas layanan. 2. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas Adanya regulasi yang mendukung penyelenggaraan layanan infrastruktur secara transparan dan berkelanjutan. Prosedur kerja yang jelas dan efisien dalam pengelolaan layanan public. 3. Dukungan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Efektif Pengalokasian anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap program pembangunan. Penggunaan Teknologi dan Inovasi	1. Bidang Irigasi Kurang meratanya penyediaan irigasi di Kab Kediri Penyediaan diesel diperlukan pada saat musim kemarau. 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlunya ditingkatkan pengguna RTH antara lain penerangan (lampu taman), pengelolaan parkir (parkir masih terbatas), pengelolaan sampah (pemisahan sampah organik dan anorganik), dan penataan RTH yang memungkinkan area RTH menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar (contohnya ada area untuk berjualan) 3. Persampahan Tidak ada proses pemilahan di rumah tangga, sampah dipilah di TPS3R Sebagian masyarakat tidak menyalurkan sampah ke TPS, melainkan melakukan pembakaran atau menyetor sampah ke bank sampah atau menjual sampah jenis dus ke pengepulan 4. Perumahan dan Permukiman ▪ perlu ditingkatkan menurut warga adalah distribusi bantuan RTLH seharusnya lebih	Mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi riil terkait layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri meliputi jalan dan jembatan, transportasi, infrastruktur air bersih dan irigasi, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur ruang public (RTH) , infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi dan persampahan; 2.Mengukur angka/capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2026; 3.Menganalisis antara hasil cap aian yang diperoleh pada tahun 2025dengan target/sasaran yang telah ditetapkan di dokumen peruba han RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026; 4.Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan infrastruktur Kabupaten Kediri menurut indikator ketersediaan fisik(availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility). penyerapan tenaga kerja (job creation), dan	1. Bidang Irigasi ▪ Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah: ▪ Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat 3. Persampahan ▪Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah: ▪Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri ▪Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 4.Perumahan dan Permukiman ▪Meningkatkan penataan peruma han dan kawasan pemukiman yan g sehat dan berkelanjutan: ▪Pembangunan rumah layak huni 5. Jalan dan Jembatan ▪Memantapkan penyediaan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan infrastruktur seperti e-KIR, monitoring kondisi jalan, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur. Inovasi dalam metode pembangunan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Faktor Eksternal: 1. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder Sinergitas dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur. Kemitraan dengan investor dalam penyediaan infrastruktur strategis melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). 2. Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat Adanya mekanisme umpan balik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang meningkat seiring dengan pelayanan infrastruktur yang lebih baik.	merata dan tepat sasaran, sebab masih terdapat beberapa rumah tidak layak yang memerlukan bantuan RTLH namun belum mendapatkannya 5. Jalan dan Jembatan perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) perlu adanya perbaikan permukaan jalan yang rusak dan berlubang karena dilalui kendaraan berat; dan beberapa ruas jalan dirasa masih memiliki lebar yang kurang terutama jika dilalui oleh dua arah kendaraan secara bersamaan. 6. Perhubungan. perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) Perlu dilakukan penambahan rambu jalan, penertiban marka jalan dan perbaikan lampu lalu lintas yang rusak; (b) Perlu adanya penambahan lampu lalu lintas di jalur cepat; (c) Server uji kendaraan sering mengalami masalah dan hambatan	kontribusi terhadap perekonomian yang terjadi pada pengukuran capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri; 5.Mengidentifikasi dan menganalisis prioritas atribut-atribut pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri; 6.Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah	infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah: ▪Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran 6.Perhubungan ▪Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah: ▪Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan ▪Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ ▪Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		3. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat Kebijakan nasional yang sejalan dengan pembangu nan daerah, seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur. Peraturan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur. 4.Kondisi Geografis dan Ketersediaan Sumber Daya Alam •Wilayah yang mendukung pengembangan infrastruktur dengan ketersediaan bahan baku dan akses yang memadai. • Pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.			
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1. kualitas perencanaan teknis yg baik 2. SDM tim pelaksana kegiatan yang kompeten 3. Ketersediaan anggaran memadai 4. Kondisi Lingkungan dan Iklim	1. Kondisi Jaringan Jalan yang Luas dan Variatif 2. Keterbatasan Data dan Sistem Manajemen Jalan	1. Penyusunan perencanaan berbasis data kondisi aktual (survey jalan rutin)	1. Penguatan perencanaan berbasis prioritas 2. Pemutakhiran data kondisi jalan secara berkala 3. Optimalisasi pemeliharaan rutin dan preventif

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1. kualitas perencanaan teknis yg baik 2. SDM tim pelaksana kegiatan yang kompeten 3. Ketersediaan anggaran memadai 4. Peran aktif HIPPA 5. Kondisi hidrologi dan ketersediaan air	1. Luas dan Kompleksitas Jaringan Irigasi 2. Data dan Informasi Jaringan Irigasi yang Belum Lengkap 3. Kondisi alam dan iklim 4. Tingginya Laju Sedimentasi	1. Penyusunan perencanaan berbasis data kondisi aktual (survey irigasi rutin)	1. Inventarisasi dan pemutakhiran data jaringan irigasi 2. Penguatan operasi dan pemeliharaan (OP) 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan OP
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	1. Ketersediaan dan Kompetensi SDM 2. Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program 3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Kewenangan 4. Partisipasi dan Dukungan Masyarakat	1. Keterbatasan Anggaran 2. Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan yang Kurang Optimal 3. Lamanya Proses Persetujuan Substansi 4. Keterbatasan Dukungan Pembiayaan Eksterna	1. Penajaman prioritas penyusunan RTRW/RDTR 2. Efisiensi tahapan kegiatan tanpa mengurangi substansi	-
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	1. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan program SPAM 2. Perencanaan teknis yang sudah disiapkan pada tahun sebelumnya 3. Sinkronisasi program dengan perencanaan berjalan dengan baik 4. Terdapat kelompok pengelola SPAM dibeberapa desa 5. Partisipasi dan Komitmen Masyarakat terhadap ketersediaan air minum sangat kuat	1. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi penyehatan lingkungan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Masih banyak daerah yang susah untuk terakses air minum dikarenakan lokasi sumber air yang terlalu jauh 3. Anggaran yang berkurang dikarenakan sudah tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum dari Pemerintah Pusat 4. Masih banyak kelompok pengelola SPAM (KPSPAM) yang belum berbadan hukum	1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan uji komptensi untuk penyehatan lingkungan 2. Berkolaborasi dengan Desa untuk mengatasi masalah air minum di wilayah yang sulit terjangkau 3. Mengoptimalkan kelompok swadaya masyarakat (KSM/KPSPAMS) untuk mengelola sarana air minum secara mandiri, yang terbukti meningkatkan keberlanjutan layanan 4. Mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur air minum	1. SDM yang memenuhi kualifikasi akan mengikuti uji kompetensi untuk jabatan fungsional penyehatan lingkungan 2. Menyediakan penampungan air komunal di lokasi yang mudah diakses warga yang belum memiliki sambungan rumah. 3. Melakukan pendampingan intensif agar pengelola lokal mampu menerapkan tarif yang cukup untuk biaya pemeliharaan (cost recovery) 4. Penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan di sekitar sumber air baku untuk menjaga ketersediaan debit air tanah jangka panjang

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Persentase Rumah Layak Huni	1. Kemampuan dinas dalam mengalokasikan dan mengelola APBD secara efektif untuk mendampingi dana dari pusat (sharing budget); 2. Adanya SOP yang jelas, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, hingga pencairan dana, memastikan transparansi dan akuntabilitas 3. Keahlian staf dalam melakukan verifikasi lapangan, pendampingan teknis konstruksi kepada masyarakat, serta administrasi pelaporan sesuai regulasi. 4. Adanya dukungan program nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR yang menambah kuota penanganan di daerah 5. Kesiapan masyarakat penerima manfaat untuk bergotong-royong atau menambah dana secara swadaya guna menutupi kekurangan biaya konstruksi (karena bantuan biasanya bersifat stimulan)	1. Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD) untuk menampung seluruh usulan perbaikan rumah 2. Akurasi Data Verifikasi yaitu adanya data warga yang kurang mutakhir atau duplikasi data penerima bantuan yang seringkali menghambat proses penetapan prioritas 3. Rendahnya tingkat gotong royong atau keswadayaan masyarakat sekitar untuk membantu proses pembangunan fisik rumah penerima manfaat 4. Adanya gesekan antar warga terkait kecemburuan sosial dalam penentuan penerima bantuan, atau intervensi kepentingan politik tertentu di tingkat lokal	1. Melibatkan pihak perusahaan swasta di lingkungan wilayah kabupaten kediri melalui CSR 2. Mengembangkan sistem informasi mandiri untuk verifikasi real-time 3. Melibatkan pihak perusahaan swasta di lingkungan wilayah kabupaten kediri melalui CSR 4. Mengembangkan sistem informasi mandiri untuk verifikasi real-time	1. Berkoordinasi dengan perusahaan yang punya potensi untuk melaksanakan CSR 2. Update data real time RTLH melalui Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang dimiliki Dinas Perkim 3. Melaksanakan verifikasi lapangan yang lebih akurat dengan melibatkan perangkat desa agar penyampaian bantuan tepat sasaran 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan bersifat stimulant sehingga dibutuhkan partisipasi warga dalam pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	1. perencanaan jelas dan terukur; 2. kerjasama tim yang baik; 3. dukungan stakeholder; 4. kerjasama msayarakat yang baik.	1.keterbatasan SDM 2.kurangnya evaluasi 3.kondisi di lapangan 4.kurang komunikasi dengan pihak luar	1.pengembangan SDM 2.penguatan system monev 3.peningkatan koordinasi 4.optimalisasi penggunaan teknologi	1. mengadakan pelatihan SDM; 2. menyusunstrategi perbaikan; 3. memperkuat Kerjasama dengan pihak luar; 4. meningkatkan pengawasan dan koordinsi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	1. Peningkatan promosi wisata kuliner khas Kediri secara digital; 2. Fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha akomodasi dan kuliner; 3. Beroperasinya Bandara Dhoho Kediri yang meningkatkan mobilitas pendatang; 4. Munculnya usaha kafe dan restoran baru oleh swasta yang meningkatkan variasi pilihan;	1. Keterbatasan anggaran untuk event pameran skala nasional; 2. Fluktuasi harga bahan pokok yang mempengaruhi daya beli wisatawan terhadap produk kuliner; 3. Persaingan tarif hotel dengan daerah tetangga.	1. Melakukan Pembinaan Perizinan Pelaku usaha makanan dan minuman berbasis risiko.	1. Pengembangan paket wisata "bundling" antara akomodasi, kuliner, dan destinasi wisata. 2. Optimalisasi promosi wisata di area Bandara.
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1. Penerapan e-ticketing di beberapa destinasi utama. 2. Perbaikan fasilitas dasar di area wisata Gunung Kelud dan Ubalan.	1. Kurangnya atraksi baru/wahana buatan di destinasi milik Pemkab dibandingkan wisata swasta; 2. Sarana prasarana di beberapa objek wisata pemerintah mulai membutuhkan beberapa perbaikan; 3. Cuaca ekstrem berkepanjangan (hujan intensitas tinggi) yang mengurangi kunjungan wisata alam; 4. Menjamurnya destinasi wisata desa dan swasta baru yang memecah konsentrasi pengunjung.	1. Melakukan pemeliharaan rutin sarana wisata; 2. Menambah spot foto instagramable di area wisata pemerintah; 3. Menggencarkan promosi wisata melalui media sosial resmi dinas.	1. Revitalisasi total objek wisata unggulan (masterplan pengembangan); 2. Kerjasama pemanfaatan aset wisata dengan pihak ketiga (swasta) untuk investasi wahana baru; 3. Penyesuaian tarif retribusi. sesuai Perda terbaru.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	1. Ketersediaan Sumberdaya alam yang tinggi	1. Regulasi Data Kualitas udara dengan parameter PM 2,5 diambil dari citra satelit 2. Ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen pengelolaan lingkungan	1. Optimalisasi Bank Sampah; 2. Pembangunan TPS3R; 3. Pengawasan Rutin terhadap pelaku usaha/kegiatan; 4. Penanaman di Sumber air, kawasan Perlindungan setempat, lahan kritis, kanan kiri jalan; 5. Koordinasi dengan dinas/badan Instansi terkait.	1. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kepatuhan terhadap dokumen lingkungan; 2. Melaksanakan pengukuran pm 2,5 24 jam metode manual aktif; 3. Penambahan luas Ruang terbuka Hijau (RTH) dan tanaman Perindang jalan penyerap polutan; 4. Koordinasi dengan SKPD terkait untuk bersama melakukan pembangunan berkelanjutan.
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	1. Terdapat banyak aliran sungai dan sumber air di wilayah Kabupaten Kediri;	1. Belum memiliki Regulasi yang tegas terhadap kualitas air permukaan; 2. Luas Wilayah Kab Kedirii 34% merupakan lahan pertanian. Kegiatan pertanian menghasilkan bahan-bahan organik kedalam air melalui proses erosi lahan sehingga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air; 3. Terjadi pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan ke Sungai/ Waduk/ Embung; 3. Sektor Peternakan belum memiliki pengelolaan limbah; 4. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat menyebabkan meningkatnya pencemaran air akibat aktivitas manusia; 5. Pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang belum optimal.	1. Memantau kualitas lingkungan hidup (air, udara) secara berkala; 2. Melaksanakan pengawasan rutin terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah; 3. Penanamn pohon di sumber air/kawasan perlindungan setempat; 4. Melalui dinas pertanian dan perkebunan melakukan sosialisasi pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan; 5. Sosialisasi pengurangan dan pengelolaan sampah; 6. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membangun sarana sanitasi pengolahan air limbah dan darainase yang layak dan memadai untuk masyarakat.	1. Menyusun RPPLH dan RPPMA; 2. Menyusun Penetapan D3TLH; 3. Kampanye gaya hidup ramah lingkungan lebih masif baik di sektor industri maupun rumah tangga.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kualitas Udara	1. Melaksanakan uji udara ambien di beberapa titik;	1. Data Pm 2,5 diambil dari citra satelit; 2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan Industri; 3. Perilaku masyarakat membakar sampah; 4. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.	1. Kegiatan penanaman di kanan kiri jalan dan penghijauan lingkungan di desa-desa; 2. Pengukuran kualitas udara secara rutin menggunakan passive sampler (SO2 dan NO2) di kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi; 3. Pembinaan pelaku usaha terkait pengendalian pencemaran udara; 4. Pembinaan desa proklim dan desa berseri;	1. Melaksanakan pengukuran pm 2,5 24 jam metode manual aktif; 2. Penambahan luas Ruang terbuka Hijau (RTH) dan tanaman Perindang jalan penyerap polutan. 3. Koordinasi dengan dinas perhubungan untuk meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor.
	Indeks Kualitas Lahan	-	1. Alih Fungsi Lahan	1. Kegiatan penanaman daerah tangkapan air, lahan kritis; 2. Kebijakan penataan ruang yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kesesuaian lahan.	1. Konservasi kawasan rawan bencana akibat alih fungsi lahan; 2. Optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; 2. Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana; 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana; 4. Penguatan Sistem Peringatan Dini; 5. Pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan; 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 7. Partisipasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat; 8. Dukungan kebijakan dan sumber daya dari pemerintah pusat dan provinsi; 9. Peran dan dukungan lintas sektor terkait upaya penanggulangan bencana; 10. Keterlibatan Lembaga NonPemerintah dan Akademisi.	1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Jumlah personel kebencanaan yang belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat risiko); 2. Penganggaran belum optimal penanggulangan bencana yang terbatas dibandingkan tingkat ancaman; 3. Sistem Data dan Informasi yang Belum Terintegrasi Optimal; 4. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti posko, gudang logistik, dan alat komunikasi darurat; 5. Tingginya ancaman bencana alam; 6. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan; 7. Kondisi geografis dan topografis wilayah; 8. Belum maksimalnya kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pemahaman bahwa untuk membangun ketangguhan adalah tugas bersama.	1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 3. Penguatan Sistem Peringatan Dini; 4. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan; 5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor; 6. Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; 7. Dukungan Lintas Sektor dan Lembaga non Pemerintahan; 8. Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; 9. Penguatan peran media dan teknologi informasi kebencanaan.	1. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) secara lebih kuat ke dalam RPJMD, Renstra BPBD, dan Renja OPD; 2. Menyelaraskan indikator IRB dengan indikator kinerja perangkat daerah; 3. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data dan analisis risiko bencana serta Menetapkan penugasan personel kebencanaan secara lebih terfokus dan berkelanjutan; 4. Penguatan Sistem Data dan Statistik Sektoral Kebencanaan; 5. Mengoptimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 6. Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; 7. Meningkatkan kolaborasi Lintas Sektor dan Lembaga non Pemerintahan; 8. Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; 9. Penguatan peran media dan teknologi informasi kebencanaan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	1. Rutinnya pendataan dan registrasi objek pemajuan kebudayaan dan pelaku budaya; 2. Dukungan fasilitasi bagi sanggar-sanggar seni; 3. Kesadaran komunitas budaya lokal yang tinggi untuk menjaga tradisi.	1. Keterbatasan SDM Pamong Budaya untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan; 2. Kurangnya minat generasi muda pada jenis kesenian tradisional tertentu (langka peminat); 3. Dominasi budaya pop modern di media sosial.	1. Program "Lawatan Sejarah Masuk Sekolah" untuk mengenalkan budaya sejak dini. 2. Digitalisasi arsip budaya agar mudah diakses generasi muda.	1. Pemberian apresiasi atau penghargaan bagi pelestari budaya; 2. Penyelenggaraan workshop/pelatihan seni budaya berbasis milenial; 3. Penyelenggaraan Festival etnokediren.
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	1. Konsistensi penyelenggaraan kalender event tahunan (Hari Jadi Kab. Kediri, Festival Kelud); 2. Sinergi antar bidang dalam pengemasan event; 3. Partisipasi aktif Desa Wisata dalam membuat event lokal yang berskala kabupaten; 4. Dukungan komunitas seni (Dewan Kesenian) yang solid.	1. Keterbatasan venue pertunjukan indoor yang representatif untuk event skala besar saat musim hujan; 2. Jadwal event yang terkadang bentrok dengan agenda kegiatan desa/kecamatan; 3. Kendala perizinan keramaian pada situasi tertentu.	1. Kolaborasi penyelenggaraan event dengan pihak desa/kecamatan (sharing cost/tenaga); 2. Pemanfaatan ruang publik terbuka hijau (SLG) sebagai pusat kegiatan.	1. Peningkatan kualitas event agar masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN); 2. Pembangunan gedung kesenian/kebudayaan yang representatif; 3. Kurasi event desa untuk diangkat menjadi event kabupaten.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	1. Adanya komitmen daerah dalam penguatan peran lembaga kepemudaan dan olahraga sebagai mitra strategis pemerintah daerah; 2. Ketersediaan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga baik di dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan dan Program Prioritas Tahunan Kabupaten Kediri; 3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan organisasi kepemudaan serta olahraga secara berkelanjutan. 4. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan, organisasi olahraga dan komunitas pemuda dalam berbagai program pembinaan dan kegiatan daerah; 5. Dukungan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, KONI, induk organisasi cabang olahraga serta mitra swasta dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga; 6. tingginya potensi demografis di Kabupaten Kediri yang menjadi modal sosial dalam penguatan kapasitas lemabga kepemudaan dan olahraga.	1. Keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan seluruh program peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga; 2. Belum meratanya kapasitas SDM pengelola organisasi kepemudaan dan olahraga, khususnya dalam aspek manajerial, administrasi, dan pelaporan kelembagaan; 3. Ketersediaan data dan informasi kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkala. 4. Tingkat partisipasi sebagian organisasi yang belum optimal dalam mengikuti program pembinaan dan evaluasi yang diselenggarakan pemerintah daerah; 5. Keterbatasan SDM pengelola program kepemudaan dan olahraga serta kapasitas kelembagaan dan manajerial sebagian lembaga masih terbatas; 6. Validitas dan pemutakhiran data kelembagaan pemuda dan olahraga belum optimal.	1. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kelembagaan; 2. Koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam pengumpulan data prestasi kepemudaan olahraga di Kabupaten Kediri; 3. Pengumpulan dan pemutakhiran data lembaga kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kediri. 4. Kerjasama dengan KONI, dan organisasi olahraga dalam peningkatan kualitas latihan dan pembinaan bagi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri pada kompetisi sesuai potensi unggulan daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 6. Pemberian motivasi, penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi pemuda dan atlet pelajar berprestasi	1. Peningkatan sinergi dengan ssekolah, KONI, induk cabang olahraga di Kabupaten Kediri; 2. Perluasan keikutsertaan atlet pelajar dalam kompetisi di berbagai tingkat dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 3. Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri; 4. Mendorong peran serta masyarakat dan duni usaha dalam mendukugn pembinaan prestasi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Penguatan pembinaan berkelanjutan bagi atlet pelajar dan pemuda potensial di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga; 2. Tersusunnya program dan kegiatan pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri; 3. Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar pada ajang kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. 4. Peran aktif organisasi kepemudaan, sekolah dan organisasi olahraga dalam pembinaan prestasi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Dukungan KONI, induk cabang olahraga, dan pelatih dalam peningkatan kualitas pembinaan atlet Kabupaten Kediri; 6. Tingginya partisipasi pemuda dan atlet pelajar dalam berbagai kegiatan kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.	1. Belum meratanya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan yang memadai terutama di desa; 2. Keterbatasan intensitas monitoring dan evaluasi capaian prestasi olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Kediri; 3. Tidak semua pemuda dan atlet aktif dalam organisasi atau kegiatan olahraga. 4. Kesiapan dan kualitas atlet/peserta yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kediri; 5. Masih terbatasnya frekuensi dan jenjang kompetisi yang diikuti oleh beberapa atletKabupaten Kediri;	1. Prioritas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan keikutsertaan dalam ajang prestasi olahraga; 2. Pelaksanaan pembinaan, seleksi dan pendampingan peserta secara bertahap; 3. Penguatan koordinasi dengan sekolah dan unit terkait dalam pembinaan prestasi bagi para atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri. 4. Kerja sama dengan KONI dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Kediri dalam peningkatan kualitas latihan dan pembinaan; 5. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar pada kompetisi sesuai potensi unggulan daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 6. Pemberian motivasi, penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi pemuda dan atlet pelajar berprestasi Kabupaten Kediri.	1. Peningkatan kualitas perencanaan pembinaan prestasi yang lebih terarah dan berkelanjutan; 2. Pengembangan infrastruktur, fasilitas olahraga dan pengadaan peralatan olahraga yang merata di wilayah Kabupaten Kediri 3. Penguatan monitoring dan evaluasi capaian prestasi secara periodik. 4. Peningkatan sinergi dengan sekolah, KONI dan induk cabang olahraga dalam meningkatkan minat dan prestasi pemuda di bidang olahraga; 5. Perluasan keikutsertaan dalam kompetisi di berbagai tingkat mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan : **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan dan ekonomi desa; 2. Ketersediaan data dan hasil pengukuran Indeks Desa sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi; 3. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUMDesa; 4. Dukungan perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan arah pembangunan desa; 5. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa; 6. Ketersediaan Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya untuk pengembangan ekonomi; 7. Partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan desa dalam pengembangan usaha ekonomi berbasis potensi lokal; 8. Dukungan pendamping desa dan jejaring kemitraan dalam pengembangan ekonomi desa.	1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan pengelola BUMDesa di sebagian desa; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan ekonomi desa secara berkelanjutan; 3. Keterbatasan koordinasi dan integrasi program antar perangkat daerah dalam Menunjang peningkatan indeks ekonomi desa; 4. Perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antar desa yang mempengaruhi kecepatan peningkatan indeks desa; 5. Keterbatasan akses pasar, permodalan, dan teknologi usaha masyarakat desa; 6. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya Menunjang pengembangan ekonomi produktif; 7. Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar yang mempengaruhi keberlanjutan usaha ekonomi desa.	1. Penguatan perencanaan, penganggaran serta pengendalian program pembangunan desa agar lebih terarah pada peningkatan indeks desa; 2. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah dan aparatur desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan ekonomi desa dan BUMDesa; 3. Optimalisasi pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar penetapan kebijakan, prioritas program dan evaluasi kinerja pembangunan desa; 4. Penguatan koordinasi dan integrasi program antar perangkat daerah dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa. 5. Fasilitasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; 6. Penguatan peran BUMDesa dan kerjasama antar desa dan pihak swasta dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa; 7. Sinergi dengan pemerintah pusat, pendamping desa dan pihak swasta dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa; 8. Peningkatan akses masyarakat desa terhadap permodalan, pemasaran dan inovasi usaha.	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Desa secara berkala sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan desa; 2. Penyusunan dan penyesuaian program pembinaan desa yang lebih fokus pada peningkatan indeks desa; 3. Penguatan peran perangkat daerah dalam pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan; 4. Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi desa; 5. Peningkatan pendampingan kepada pemerintah desa dan BUMDesa dalam pengembangan usaha ekonomi dan kemitraan usaha; 6. Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha, lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya; 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan usaha desa; 8. Penguatan jejaring pemasaran produk unggulan desa untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan status desa melalui kebijakan dan program pembangunan desa; 2. Ketersediaan data Indeks Desa sebagai dasar penetapan indikator persentase desa maju dan desa mandiri; 3. Pelaksanaan pembinaan pendampingan dan fasilitasi desa oleh perangkat daerah terkait; 4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa; 5. Dukungan kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan dan kemandirian desa; 6. Ketersediaan Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya untuk Menunjang pembangunan dan pemberdayaan desa; 7. Peran aktif pemerintah desa, BUMDesa, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi desa; 8. Dukungan pendamping desa dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan desa.	1. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan kelembagaan desa antar wilayah; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan desa secara merata dan berkelanjutan; 3. Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah dalam Menunjang percepatan peningkatan status desa. 4. Ketimpangan potensi dan karakteristik desa yang mempengaruhi kecepatan peningkatan status desa; 5. Keterbatasan akses pasar, permodalan dan teknologi di sebagian desa; 6. Dinamika kondisi ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi capaian status desa.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa; 2. Pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar evaluasi dan penajaman program peningkatan status desa; 3. Sinkronisasi dan integrasi program pembangunan desa antar perangkat daerah; 4. Fasilitasi pengembangan BUMDesa dan usaha ekonomi produktif masyarakat desa; 5. Pendampingan desa dalam pemanfaatan Dana Desa untuk Menunjang peningkatan kemandirian desa; 6. Peningkatan peran masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.	1. Penguatan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Desa untuk mendorong peningkatan persentase desa maju dan desa mandiri; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pendampingan desa yang lebih fokus pada percepatan peningkatan status desa; 3. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam Menunjang kemandirian desa secara terpadu;

F. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel 7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	45	16,64	36,98%	Kurang Menunjang
				Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	60	55,56	92,60%	Menunjang
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	65	71,88	110,58%	Sangat Menunjang
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	40	63,09	157,73%	Sangat Menunjang
				Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	25	98,94	395,76%	Sangat Menunjang
				Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	60	45,53	75,88%	Cukup Menunjang
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	45	87,5	194,44%	Sangat Menunjang
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100	100	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1:15	1:17	100,00%	Menunjang
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. ALKES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	76%	101,67%	Sangat Menunjang
				PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	69%	96%	138,77%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60%	87,95%	147,00%	Sangat Menunjang
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	10,61%	76,00%	Cukup Menunjang
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	96%	97,59%	102,00%	Sangat Menunjang
			Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	9,49%	105,00%	Sangat Menunjang
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	11,12%	111,00%	Sangat Menunjang
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	89%	89%	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10,10%	7,44%	126,33%	Sangat Menunjang (Pengukuran Bermakna Negatif)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB : 32,87% BKR : 28,84% BKL : 36,32%	BKB : 59,85% BKR : 54,88% BKL : 48,50%	168,63%	Menunjang
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sasaran masyarakat yang terbina terkait Nasionalisme	85%	100%	117,00%	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase partisipasi aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama	85%	100%	117,00%	Menunjang
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Organisasi (Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	57	57	100,00%	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	100	66,63	66,63%	Cukup Menunjang
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100	132,12	132,12%	Sangat Menunjang
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	100	79,18	79,18%	Cukup Menunjang
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	400	400,00%	Sangat Menunjang
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	150	150,00%	Sangat Menunjang
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100	86,29	86,29%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan yang Tersusun	100%	91,50%	91,50%	Menunjang
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun	100%	146%	146,00%	Menunjang
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun	100%	90,23%	90,23%	Menunjang
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asitensi yang tersusun	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD	100%	100%	100,00%	Menunjang
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29.97	29.99	100,07%	Sangat Menunjang
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	52.03	53.68	103,17%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
			Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya investasi di daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Menunjang
			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	84%	100,00%	119%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 persen	100 persen	100%	Menunjang
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	13,04	33,21	110%	Sangat Menunjang
			program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit	1,71	7,50	110%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Simpan Pinjam yang cukup sehat				
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,22	1,04	110%	Sangat Menunjang
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33,67	46,81	110%	Sangat Menunjang
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	2,5	2,41	96%	Menunjang
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5,34	5,12	96,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50	53,34	106,68%	Sangat Menunjang
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90	81	90,00%	Menunjang
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70	70	100,00%	Menunjang
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90	62,83	69,81%	Cukup Menunjang
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70	70	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15	120	Di surat : 110,00% Hasil perhitungan: 800,00%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	0,15	0,15	100,00%	Menunjang
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	1 rumusan	1 rumusan	100,00 %	Menunjang
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100,00 %	Menunjang
				Skor Pola Pangan Harapan	95,2	93,11	97,80%	Menunjang
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	2 desa	2 desa	100,00 %	Menunjang
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	*82 %*	*90%*	*109,15 %*	Sangat Menunjang
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100	*100*	*100,00 %*	Menunjang
				Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	83,31	*89,49*	*107,42 %*	Sangat Menunjang
				Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	70	70	100,00 %	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	73	73	100,00 %	Menunjang
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	92	92	100,00 %	Menunjang
			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100	100	100,00 %	Menunjang
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	25.449	25.514,27	100,00%	Menunjang
				Ikan Hias (ribu ekor)	407.405	408.258,88	100,00%	Menunjang
				Benih (juta ekor)	21.651,82	21.709,40	100,00%	Menunjang
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	80%	80%	100,00%	Menunjang
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	12,83	12,83	100,00%	Menunjang
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1.091,50	1.094,09	100,24%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150.370,42	154.313,11	102,62%	Sangat Menunjang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100,00%	Menunjang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	89%	86,10%	96,26%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh	66,09%	54,14%	81,93 %	Menunjang
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Program Penyelenggaraan Lalu lIntas dan Angkutan Jalan	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	87,5	90,53	103,46	Sangat Menunjang
				Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	80,00	80,00	100,00	Menunjang
				Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	77,17	45,66	59,17	Cukup Menunjang
				Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	98,00	98,12	100,12	Sangat Menunjang
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	12,50%	12,79%	102,32%	Sangat Menunjang
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	2,75%	3,30%	120,00%	Sangat Menunjang
			Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	2 hari	2 hari	100,00%	Menunjang
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83,00 %	100 %	120,00%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	72,42 %	64 %	88,37%	Menunjang
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	324 usaha/kegiatan	330 usaha/kegiatan	102,00%	Sangat Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	75,00 %	91,30%	122,00%	Sangat Menunjang
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	70,00%	8,96%	Di surat: 0,13% Perhitungan: 13%	Kurang Menunjang
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	28,72%	57,44%	200,00%	Sangat Menunjang
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	-	-	0	Kurang Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0,05%	0,0004%	Di surat: 0,75% Pengukuran: 0,80%	Cukup Menunjang
			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	75,00%	57,79%	77,05%	Cukup Menunjang
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator IKD	100 %	99,29 %	99,29 %	Menunjang
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	54,00	19,23	35,61	Kurang Menunjang
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	75	65,22	86,96	Menunjang
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	25,00%	55,00%	220,00%	Sangat Menunjang
			Pengembangan Kesenian Tradisional	% Peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	25,00%	69,00%	277,20%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	37,00%	52,00%	140,54%	Sangat Menunjang
			Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100,00%	Menunjang
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	95%	95%	100,00%	Menunjang
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	90%	90%	100,00%	Menunjang
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	95%	95%	100,00%	Menunjang
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	95%	95%	100,00%	Menunjang

Keterangan

Kategori Penilaian	Jumlah	Persentase
Sangat Menunjang	43	37,72%
Menunjang	59	51,75%
Cukup Menunjang	8	7,02%
Kurang Menunjang	4	3,51%
TOTAL	**114**	**100%**

G. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 8 Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100,88	Rp324.367.414.145,00	Rp309.868.658.301,60	95,53	5,35%	Efektif dan Efisien
	Rata-Rata Lama Sekolah	100,96	Rp324.367.414.145,00	Rp309.868.658.301,60	95,53	5,43%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	100,45%	Rp466.994.081.997,00	Rp422.098.658.666,33	90,38%	10,07%	Efektif dan Efisien
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	97,67%	Rp14.599.273.150,00	Rp13.763.734.485,00	94,28%	3,39%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	99,04%	Rp36.120.266.199,00	Rp34.502.888.310,00	95,52%	3,52%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100,00%	Rp733.974.000,00	Rp733.962.000,00	99,99%	0,01%	Efektif dan Efisien
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	83,15%	Rp219.116.700,00	Rp150.015.179,00	68,46%	14,69%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
	I K M	99,17%	Rp198.268.200,00	Rp129.664.680,00	65,39%	33,78%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
	Opini BPK terhadap LKPD	100,00%	Rp723.594.469.529,00	Rp713.116.623.515,00	98,55%	1,45%	Efektif dan Efisien
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	102,39%	Rp226.100.000,00	Rp172.335.103,00	76,22%	26,17%	Efektif dan Efisien

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	102.51%	Rp11.934.237.890,00	Rp10.944.832.161,00	91.71%	10.80%	Efektif dan Efisien
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	100,00%	Rp5.245.800.000,00	Rp5.155.254.243,00	98,27%	1,73%	Efektif dan Efisien
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	-212,00%	Rp7.745.590.205,00	Rp6.939.138.599,00	89,59%	-301,59%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	77,56%	Rp11.883.633.185,00	Rp6.528.399.196,00	54,93%	10,07%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
			Rp46.681.423.712,00	Rp37.371.652.030,00	80,06%		
					Rata-rata: 67,50%		
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	101,67%	Rp3.616.883.000,00	Rp3.510.279.237,00	97,05%	4,62%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	108,68%	Rp 63.304.654.798,-	Rp55.793.883.206,00	88,13%	21,61%	Efektif dan Efisien
			Rp8.235.207.800,00	Rp7.082.343.275,00	86%		
					Rata-rata: 87,07%		
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	102,70%	Rp96.642.692.893,00	Rp93.252.600.490,00	96,00%	6,70%	Efektif dan Efisien

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	109,25%	Rp23.442.697.163,00	Rp19.622.854.515,00	84,00%	25,25%	Efektif dan Efisien
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	Rp722.374.700,00	Rp698.948.476,00	97,00%	3%	Efektif dan Efisien
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	100,01%	Rp2.395.182.313,00	Rp1.407.797.000,00	58,78%	41,23%	Efektif dan Efisien
	Persentase Rumah Layak Huni	101,12%	Rp423.025.205,00	Rp251.183.653,00	59,38%	41,74%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	93,17	Rp68.251.500,00	Rp65.199.972,00	95,53	-2,36%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	3,01%	Rp6.650.520.765,00	Rp5.685.631.656,00	85,49%	-82,48%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	102,54%	Rp40.046.717.148,00	Rp37.585.672.739,00	93,85%	19,51	Efektif dan Efisien
	Indeks Kualitas Udara	**89,97%**					
	Indeks Kualitas Lahan	147,56%					
		Rata-rata: 113,36%					
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	88,75%	Rp5.076.855.300,00	Rp4.266.277.728,00	84,03%	4,72%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	102,91%	Rp9.046.997.690,00	Rp8.050.471.043,00	88,99%	13,92%	Efektif dan Efisien

Keterangan:

Kategori Penilaian	Jumlah (Frekuensi)	Persentase
Efektif dan Efisien	17	70,08%
Belum Efektif (Kinerja <100%)	9	29,2%
TOTAL	**26**	**100%**

H. Realisasi Anggaran

Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran per 28 Februari 2026 (*Unaudited*)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4/3)*100*
4	PENDAPATAN DAERAH	3.317.023.312.885,54	3.361.022.617.572,85	101,32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	878.163.044.317,54	870.646.435.934,08	99,14
4.1.01	Pajak Daerah	455.446.318.826,00	450.014.217.011,20	98,80
4.1.02	Retribusi Daerah	312.623.002.162,54	315.976.359.515,18	101,07
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.990.158.640,00	11.707.776.956,10	83,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	96.103.564.689,00	92.948.082.451,60	96,71
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	878.163.044.317,54	870.646.435.934,08	99,14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.421.416.777.574,00	2.472.148.842.434,00	102,09
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.249.644.394.574,00	2.279.696.464.784,00	101,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	171.772.383.000,00	192.452.377.650,00	112,03
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	171.772.383.000,00	192.452.377.650,00	112,03
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.421.416.777.574,00	2.472.148.842.434,00	102,09

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4/3)*100*
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.443.490.994,00	18.227.339.204,77	104,49
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	783.898.207,77	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.443.490.994,00	17.443.440.997,00	99,99
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.443.490.994,00	18.227.339.204,77	104,49
	JUMLAH PENDAPATAN	3.317.023.312.885,54	3.361.022.617.572,85	101,32
5	BELANJA DAERAH	3.539.790.270.834,00	3.198.460.496.513,12	90,35
5.1	BELANJA OPERASI	2.549.880.834.464,00	2.279.538.012.411,65	89,39
5.1.01	Belanja Pegawai	1.314.426.342.043,00	1.174.242.820.092,48	89,33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.018.276.060.821,00	933.654.359.929,17	91,68
5.1.05	Belanja Hibah	178.702.431.600,00	137.192.082.390,00	76,77
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	38.476.000.000,00	34.448.750.000,00	89,53
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.549.880.834.464,00	2.279.538.012.411,65	89,39
5.2	BELANJA MODAL	322.121.286.484,00	284.521.208.318,50	88,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.152.547.600,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.496.965.351,00	72.315.356.795,08	89,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.545.526.011,00	107.539.785.882,82	86,34

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4/3)*100*
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.040.089.667,00	92.990.376.485,60	94,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.326.157.855,00	11.325.846.355,00	99,99
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	560.000.000,00	349.842.800,00	62,47
	JUMLAH BELANJA MODAL	322.121.286.484,00	284.521.208.318,50	88,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.660.964.886,00	4.893.903.348,97	41,96
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.660.964.886,00	4.893.903.348,97	41,96
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	11.660.964.886,00	4.893.903.348,97	41,96
5.4	BELANJA TRANSFER	656.127.185.000,00	629.507.372.434,00	95,94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	619.627.185.000,00	593.007.372.434,00	95,70
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	656.127.185.000,00	629.507.372.434,00	95,94
	JUMLAH BELANJA	3.539.790.270.834,00	3.198.460.496.513,12	90,35
	SURPLUS/DEFISIT	(222.766.957.948,46)	162.562.121.059,73	(72,97)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	222.766.957.948,46	222.766.957.949,76	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	235.944.377.304,46	235.944.377.305,76	100,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (4/3)*100*
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	235.944.377.304,46	235.944.377.305,76	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	235.944.377.304,46	235.944.377.305,76	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.177.419.356,00	13.177.419.356,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
6.2.07	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	9.677.419.356,00	9.677.419.356,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.177.419.356,00	13.177.419.356,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	222.766.957.948,46	222.766.957.949,76	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	385.329.079.009,49	0,00

Sumber: LRA APBD BPKAD per 28 Februari 2026 sebagaimana terlampir dalam LKPJ/LPPD

I. Mekanisme Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Tabel 10 Mekanisme Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025**
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	$HLSt = FK \sum_{i=a}^{n} \frac{Et}{a\ Pt}\ i$ (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025
	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Berita Resmi Statistik No. 57/11/35/Th. XXIII, 5 November 2025 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah angka angkatan kerja 15 tahun keatas / Jumlah Penduduk usia kerja) X 100% (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 57/11/35/Th. XXIII, 5 November 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Berita Resmi Statistik No. 09/09/3506/Th. XXIX, 25 September 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Sosial tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.26/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	jumlah keluarga sejahtera 2, 3, dan 3+ dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus / Jumlah Keluarga	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi sebagaimana termuat dalam Surat Kepala DP2KBP3A tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.2/16/418.22/2026
Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Diukur oleh Lembaga Akademisi/Professional	Penghitungan berdasarkan agregasi indikator kebebasan sipil, hakhak politik, dan lembaga demokrasi sesuai metodologi	Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	Jumlah konflik yang difasilitasi dibagi jumlah konflik yang ada dikali 100%		Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Diukur oleh Kementerian PANRB**	**Diukur oleh Kementerian PANRB dengan metode sesuai PermenPANRB nomor 9 Tahun 2023**	**Diambil per tanggal 12 Februari 2025 dari Menu Evaluasi pada portalrb.id**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi dari Kemenpan & RB.	Diukur oleh Kementerian PANRB dengan metode sesuai PermenPANRB nomor 88 Tahun 2021	Surat Menteri PANRB tanggal 30 Desember 2025 nomor B/513/AA.05/2025
	I K M	Nilai capaian IKM Pelayanan	Nilai capaian IKM Pelayanan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
	Opini BPK terhadap LKPD	Diukur oleh BPK	Diukur oleh BPK	Surat Resmi: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 67.A/LHP/XVIII.S BY/05/2025 Tanggal 23 Mei Tahun 2025.
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Hasil survei indeks persepsi anti korupsi dari KPK	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan indeks profesionalitas ASN sesuai dengan Perka BKN no 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	1. Dimensi Kualifikasi, bobot 25% 2. Dimensi Kompetensi, bobot 40% 3. Dimensi Kinerja, bobot 30% 4. Dimensi Disiplin, bobot 5%	Surat dari Badan Kepegawaian Negara perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Laman https://asndigital.bkn.go.id Berdasarkan Surat BKN Nomor 15014/BBM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025, BKN menyampaikan bahwa pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tidak lagi dilaksanakan oleh BKN
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	Hasil evaluasi dari Kemenpan & RB	Diukur berdasarkan metode dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026**
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	((Nilai Investasi Tahun n – Nilai Investasi tahun n – 1) / Nilai investasi tahun n – 1) X 100%	(Rp. 1.688.461.116.537-Rp4.636.215.436.458)/ Rp4.636.215.436.458*100%	Laporan Realisasi Tahun 2025 (Sumber : data.bkpm.go.id)
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Diukur oleh BPS) / 12	12.968.000 / 12	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 21 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/28/418.28/2026 dan Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.7.2.6/25/418.29/2026
Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026**
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Jumlah ketersediaan pangan utama/Jumlah penduduk Kg/kapita/Tahun	• Produksi beras= 200.484,05 ton • Pemasukan (distribusi beras masuk) = 46.080 ton • Pengeluaran (distribusi beras keluar) = 35.543 ton • Stok beras penggilingan= 15.883 ton	Data Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tanggal 28 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.36/2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
			• Stok Bulog= 25.000 ton • Total ketersediaan beras= produksi+pemasukan-pengeluaran+stok= 251.904,050 ton=251.904.050 kg • Jumlah penduduk= 1.691.976 jiwa • Ketersediaan Pangan Utama= 251.904.050 kg / 1.691.976 jiwa= 148,88kg/kapita/tahun	
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	NTP Dihitung oleh Bappeda Kabupaten Kediri dengan melakukan metode survey yang melibatkan pihak ketiga/rekanan	NTP Dihitung oleh Bappeda Kabupaten Kediri dengan melakukan metode survey yang melibatkan pihak ketiga/rekanan (113,73)	Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/91/418.37/2026
Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**Diukur oleh Lembaga Akademisi/Professional**	**Diukur dalam Laporan Akhir IKLI Tahun 2025**	**Laporan Akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri 2025 Hal. 122 Kategori Kepuasan sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 2 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.54/2026**
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ panjang jaringan jalan Kabupaten X 100%	1094.09 km / 1224.2km x 100%	Hasil survey kondisi jar irigasi bidang OP SDA Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dikali 100%	154313.11m / 174829m x 100%	Hasil survey kondisi jalan bidang PT Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang di selesaikan (%)	4 buah / 4 buah x 100%	Hasil kegiatan penetapan kebijakan bidang Penataan Ruang Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum / Jumlah Rumah Tangga x 100 %	481.394 KK / 559.128 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah RTLH yang ditangani / Jumlah RTLH X 100%	9.086 Rumah / 16.779 Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	Survey online melalui aplikasi e-sukma jatim	Surat Kepala Dinas Perhubungan tanggal 23 Januari 2025 nomor 000.8.6.3/97/418.34/2026
Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026**
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	jumlah PAD pariwisata tahun n dikurangi jumlah PAD pariwisata tahun n – 1 dibagi jumlah PAD pariwisata tahun n – 1 dikali 100%	Rp. 3.511.722.000 - Rp. 3.500.000.000 / Rp. 3.500.000.000 X 100%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**Diukur oleh KemenLH**	**IKLH = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 x IKL)**	**Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026**
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	Diukur oleh KemenLH	Laporan Hasil Uji Sampel Air	(sda)
	Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – (X (leu – 0,1)) Leu = 50% indeks SO2 + 50% indeks NO2 (Diukur oleh KemenLH)	Laporan Hasil Uji udara	(sda)
	Indeks Kualitas Lahan	Diukur oleh KemenLH	Peta/Data hasil citra satelit identifikasi tutupan lahan	(sda)
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Penghitungan Indeks Risiko Bencana dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mekanisme perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan analisis ancaman bencana (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) pada suatu wilayah. BNPB mengolah data spasial dan statistik sektoral yang bersumber dari	Diukur oleh BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur	Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 30 Januari 2026 nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Pelaksana BPBD tanggal 10 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/12/418.74/2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
		kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta hasil pemutakhiran lapangan, kemudian melakukan standardisasi dan pembobotan indikator sesuai metodologi nasional yang berlaku. Nilai ancaman diperoleh dari probabilitas kejadian dan intensitas bencana, kerentanan dihitung berdasarkan aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, sedangkan kapasitas mencerminkan kemampuan daerah dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana. Selanjutnya, ketiga komponen tersebut dikalkulasi menggunakan formula risiko bencana, sehingga menghasilkan skor Indeks Risiko Bencana yang diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi, serta dipublikasikan melalui sistem informasi kebencanaan nasional sebagai rujukan		

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
		perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana		
Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**(Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan/ Jumlah Seni Budaya yang ada x 100%)**	**60 / 66 x 100%**	**Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026**
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	Jumlah event budaya skala kab/prov/nasional yang diselenggarakan satu tahun dibagi seluruh event budaya dari desa sampai kabupaten dikali 100%	200 / 343 x 100%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif)	= (50% x 16) + (50% x 130) = 73	Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	(∑ Prestasi yang dicapai/∑ Perlombaan yang diikuti) x 100%	117/152 x 100%=76,97%	Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**Diukur oleh Kementerian Desa**	**Rata – Rata Indeks Desa Kabupaten Kediri dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Kediri dikali 100%**	**Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5
				000.8.6.3/8/418.24/2026
Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	∑desa mandiri dan maju X 100% ∑desa seluruhnya	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Kabupaten Kediri dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Kediri dikali 100%	Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.24/2026

BAB IV
Penutup

Perjalanan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2025 telah dilewati. Seluruh rencana yang telah ditetapkan merupakan pengejawantahan dari komitmen penuh kami untuk melayani masyarakat. Dengan mengedepankan sistem akuntabilitas, kami terus berupaya memastikan bahwa setiap program kerja memberikan dampak riil yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kediri.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan publik secara umum telah terealisasi dengan cukup baik. Namun demikian, kami berupaya untuk menguatkan tata kelola manajemen pemerintahan. Upaya pengawalan dan penguatan kinerja ini diharapkan akan secara sistematis dalam upaya Pengembangan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri kedepannya.

Kami percaya, dengan transparansi dan semangat kolaborasi, Kabupaten Kediri akan terus bertumbuh menjadi daerah yang semakin akuntabel dan berprestasi di masa mendatang.

Lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.

Jabatan : Bupati Kediri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri *0*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,69**	
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3	
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0	
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31	Dinas Tenaga Kerja
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,8	
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05	DP2KBP3A, Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79	
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	Bakesbangpol, Satpol PP
2.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,99**	
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80	Bappeda, Sekretariat DPRD, Setda
			I K M	88,74	Dispendukcapil, Balitbangda, Kecamatan
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	BPKAD, Bapenda
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	Inspektorat
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	BKD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79	
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	Bakesbangpol, Satpol PP
2.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,99**	
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80	Bappeda, Sekretariat DPRD, Setda
			I K M	88,74	Dispendukcapil, Balitbangda, Kecamatan
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	BPKAD, Bapenda
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	Inspektorat
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	BKD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan & Perpustakaan
3.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	4,65 – 5,35	
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	DPMPTSP
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267	Dinas Perdagangan, Dinas Kopusmik
4.	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**3,03**	
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/ kapita/ tahun	DKPP
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,65	DKPP, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
5.	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**	
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%	Dinas PUPR
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%	
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	89,44%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%	
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	Dinas Perhubungan
6.	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**	
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	79,65	
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35	BPBD
8.	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**	
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	Dinas Pendidikan
9.	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,78**	
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	DPMPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
DINAS		
1. DINAS PENDIDIKAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	7.043.935.330,-
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	283.097.878.015,-
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp	0,-
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	34.181.961.800,-
5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	43.639.000,-
6 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	345.823.500,-
7 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	2.581.588.400,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**327.294.826.045,-**
2. DINAS KESEHATAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	107.317.603.698,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	202.260.561.519,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.547.611.000,-
4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kasehatan dan Makanan Minuman	Rp	606.520.060,-
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.242.570.700,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**312.974.866.977,-**
RSUD KABUPATEN KEDIRI		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	217.500.000.000,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	31.674.000.000,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**249.174.000.000,-**
RSUD SIMPANG LIMA GUMUL		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	107.720.634.216,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Rp	1.400.000.000,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**109.120.634.216,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.263.355.600,-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	150.494.000,-
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.982.210.548,-
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	14.356.156.000,-
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	42.572.400,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	189.150.000,-
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp	7.925.300,-
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	137.741.800,-
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	0,-
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	56.661.000,-
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	10.878.786.800,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**30.065.053.448,-**
4.	**DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp	3.825.986.145,-
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	21.452.811.163,-
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	96.642.692.893,-
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	722.374.700,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**122.643.864.901,-**
5.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.055.173.165,-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	263.877.800,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	166.287.300,-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	519.547.000,-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	275.886.200,-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	105.793.040,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.386.564.505,-**

6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	1.285.557.900,-
2	Program Penataan Desa	Rp	15.796.800,-
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	123.364.300,-
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	8.306.037.800,-
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	3.718.677.400,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**13.449.434.200,-**

7. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	7.633.498.552,-
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	21.429.850,-
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	78.499.700,-
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	202.459.400,-
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	87.389.600,-
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	423.874.700,-
7	Program Perlindungan Penduduk	Rp	602.949.800,-
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	16.083.350.400,-
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	10.986.814.197,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**36.120.266.199,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
8.	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.737.027.049,-
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	137.811.100,-
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	3.231.284.400,-
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	21.762.400,-
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	226.025.100,-
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	17.662.663.000,-
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	74.330.200,-
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	3.136.864.800,-
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	101.502.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**26.329.270.049,-**
9.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.998.387.325,-
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	4.590.808.800,-
3	Program Aplikasi Informatika	Rp	5.122.600.000,-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	755.656.600,-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	623.394.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**19.090.846.725,-**
10.	**DINAS SOSIAL**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.801.631.369,-
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	2.909.498.000,-
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	2.254.890.670,-
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	21.578.752.400,-
5	Program Penanganan Bencana	Rp	575.700.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	231.994.600,-
7 Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	2.470.000,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**29.354.937.039,-**
11. DINAS TENAGA KERJA		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.050.343.750,-
2 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	45.540.000,-
3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	8.523.450.000,-
4 Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	225.171.200,-
5 Program Hubungan Industrial	Rp	572.427.000,-
6 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	21.941.200,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**14.438.873.150,-**
12. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.786.702.166,-
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	20.674.339.532,-
3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	5.079.904.500,-
4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	692.365.500,-
5 Program Penyuluhan Pertanian	Rp	6.315.785.600,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**35.549.097.298,-**
13. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.659.726.987,-
2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.395.182.313,-
3 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.292.981.400,-
4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.330.713.035,-
5 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	31.728.751.100,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
6	Program Kawasan Permukiman	Rp	3.944.052.857,-
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	18.797.590,-
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	42.079.615.568,-
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	150.089.360,-
10	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	224.245.200,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**95.824.155.410,-**
14.	**DINAS PERIKANAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.283.916.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.117.768.100,-
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	94.629.000,-
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	521.050.400,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.017.363.500,-**
15.	**DINAS PERHUBUNGAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.110.966.391,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp	11.664.888.206,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**12.775.854.597,-**
16.	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	12.278.680.337,-
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	31.395.498.865,-
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	633.987.900,-
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp	271.966.100,-
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	119.099.510,-
6	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp	113.433.000,-
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.861.400.000,-
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	7.358.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**46.681.423.712,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
17.	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9.879.815.298,-
2	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.758.711.665,-
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	6.115.275.445,-
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	535.245.320,-
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	3.061.610.988,-
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	1.253.596.000,-
7	Program Pembinaan Sejarah	Rp	486.805.623,-
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	848.073.414,-
9	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	638.200.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**25.577.333.753**,-
18.	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	697.159.650,-
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	475.500.966,-
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp	326.465.100,-
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	13.583.200,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**1.512.708.916,-**
19.	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	1.237.599.195,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	84.699.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	15.206.400,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	614.485.885,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	412.998.100,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	2.364.268.100,-
7	Program Pengembangan UMKM	Rp	8.391.975.700,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**13.121.232.380,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
20.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.267.176.407,-
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	2.583.516.258,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	551.020.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	849.513.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	8.475.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**7.259.700.665,-**
21.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	1.146.859.003,-
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	7.290.229.266,-
3	Program Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non-Kebakaran	Rp	1.945.000.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**10.382.088.269,-**
II	**BADAN**		
1.	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	5.868.160.200,-
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	681.086.153.168,-
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah Program	Rp	8.461.339.100,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**695.415.652.468,-**
2.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.067.190.100,-
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.949.172.100,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.016.362.200.-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1 Program Penunjangan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.112.768.280,-
2 Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.526.457.410,-
3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.464.458.500,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.103.684.190,-**
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.043.796.554,-
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.528.529.296,-
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.864.995.271,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**4.437.321.121,-**
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.997.691.423,-
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.803.943.621,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**8.801.635.044,-**
6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.479.153.400,-
2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	1.729.684.200,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**6.208.837.600,-**
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp	4.863.963.360,-
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.744.445.190,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	1.680.224.000,-
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	5 .935.236.000,-
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	5.887.342.000,-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Rp	1.079.403.320,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**21.190.613.870,-**
III	**INSPEKTORAT**		
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.935.461.700,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	438.805.600,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.554.766.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**4.929.033.300,-**
IV	**SEKRETARIAT DPRD**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.576.637.560,-
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	20.032.014.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**25.608.651.560,-**
V	**SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	68.110.724.094,-
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	41.974.587.848,-
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	5.821.670.499,-
4	Pengelolaan Perbatasan	Rp	22.055.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**115.929.037.441,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
VI	**KECAMATAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.129.279.879,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	251.562.475,-
3	Program Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.301.768.400,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	72.366.900,-
5	Program Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	1.371.344.500,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp	342.581.900,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	***10.468.904.054,-***
	TOTAL JUMLAH ANGGARAN	**Rp**	**2.450.254.128.802,-**

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el inspektorat@kedirikab.go.id
Laman inspektorat.kedirikab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kediri

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kediri, 25 Maret 2026
Inspektur Kabupaten Kediri,

Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).